

**PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN IDENTITAS ETIKA
ISLAM PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT
USAHA SYARIAH (UUS)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Dianita Nur Anggraeni Puspitasari

No Mahasiswa: 16312348

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN IDENTITAS ETIKA ISLAM PADA
BANK UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Dianita Nur Anggraeni Puspitasari

No Mahasiswa: 16312348

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

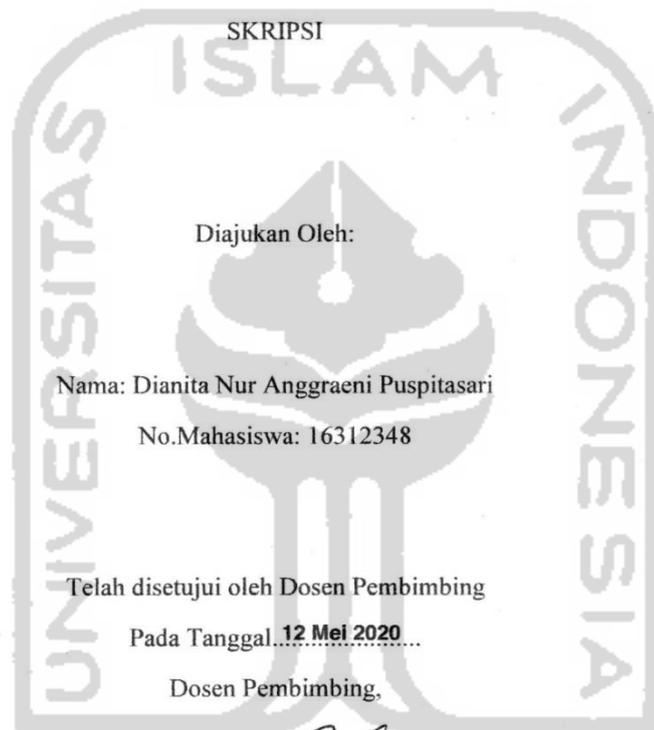
Yogyakarta, 13 Mei 2020

Penulis



(Dianita Nur Anggraeni Puspitasari)

**PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN IDENTITAS ETIKA ISLAM PADA BANK
UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS)**



SKRIPSI

Diajukan Oleh:

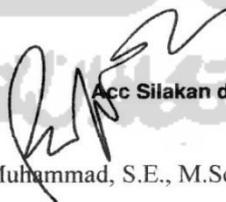
Nama: Dianita Nur Anggraeni Puspitasari

No.Mahasiswa: 16312348

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12 Mei 2020.....

Dosen Pembimbing,


Acc Silakan diujikan (12/05/2020)

(Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN IDENTITAS ETIKA ISLAM PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

Disusun Oleh : **DIANITA NUR ANGGRAENI PUSPITASARI**

Nomor Mahasiswa : **16312348**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 17 Juni 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D. 

Penguji : Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com.(SI), Ph.D. 

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia


Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan kepada orang tua saya yang telah mendidik,
menguatkan, mendukung dan selalu mendoakan saya dan adik saya.

Terimakasih karena tidak pernah berhenti berjuang untuk saya dan adik saya.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah ﷻ, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perbandingan Pengungkapan Identitas Etika Islam pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah ﷻ yang selalu memberikan kemudahan, petunjuk dan ridho kepada setiap hambaNya, dan kepada nabi junjungan kita Rasulullah ﷺ.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2018-2022, beserta seluruh pimpinan universitas.
3. Bapak Jaka Sriyana, Dr., S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak., CA., CMA selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat kepada penulis selama penyusunan skripsi.

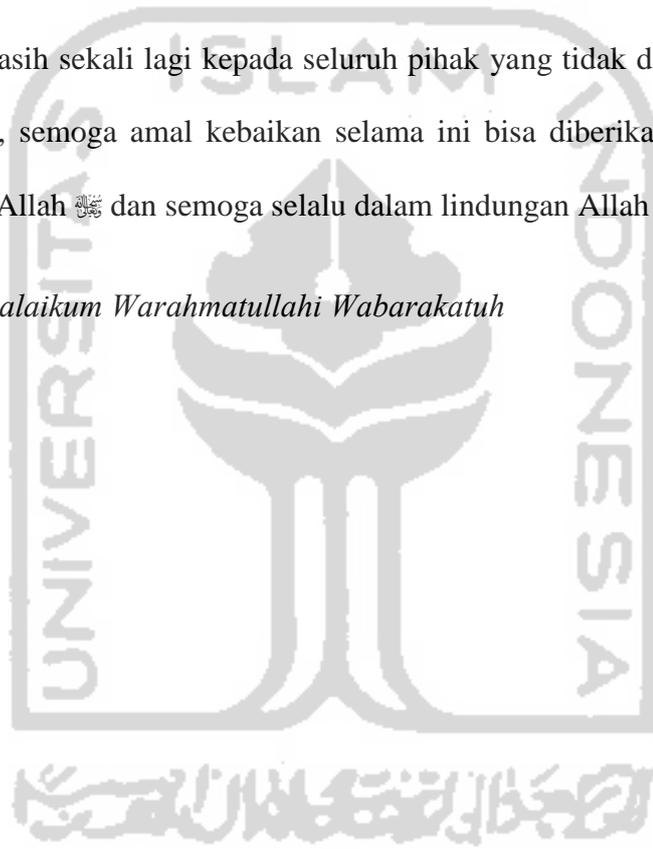
6. Bapak Rinta Anggara Kasih, Ibu Suwarni, dan Adik Nur Rohma Puspitasari, keluarga yang selalu mendukung, memberikan semangat penulis disetiap situasi dan kondisi apapun. Terimakasih atas segala bimbingan, do'a, nasehat, motivasi dan ilmu yang telah diberikan dan terimakasih sudah selalu menjadi support system yang utama bagi penulis sampai kapan pun itu. Semoga keluarga penulis selalu dalam lindungan Allah ﷻ dan penulis bisa diberikan kesempatan untuk membahagiakan keluarga penulis.
7. Anin yang sudah menjadi *support system* penulis, yang mau direpotkan selama ini, yang mau mendengarkan segala cerita penulis, dan sudah mau menemani, mendukung, menyemangati dan memberikan nasehat kepada penulis selama ini. Terimakasih sudah memberikan banyak hal-hal positif kepada penulis dan membuat penulis menjadi lebih baik lagi. Semoga semakin dilancarkan dan dimudahkan setiap urusannya, dimudahkan kerjanya, dan bisa menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Semoga selalu dalam lindungan Allah ﷻ.
8. Teman-teman “empat sekawan” (Nia, Ayu, dan Ima) yang sudah sejak kecil tumbuh bersama dan terus menemani dan memberikan semangat dan support disetiap situasi dan kondisi. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah ﷻ dan semangat berproses untuk kalian semua semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mencapai cita-cita kalian.
9. Teman-teman “7dm” (Arsita, Intan, Rini, Fitria, Ajik dan Faisal) yang sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, dan sudah mau menemani, mendukung dan memberikan semangat, dan support dari SMA hingga sekarang. Semoga Allah ﷻ memudahkan setiap urusan kalian semua, semangat berproses menuju lebih baik dan semoga Allah ﷻ selalu melindungi kalian semua.
10. Mala, Dama, Erlin, Hilwa, Abi, Rakha, dan Arif, yang sudah menemani, mau berbagi ilmu dan cerita bersama penulis dari awal kuliah hingga akhir kuliah ini. Semoga Allah ﷻ memberikan yang terbaik untuk kalian semua

dan dilancarkan setiap urusannya dan semoga Allah ﷻ melindungi kalian semua.

11. Teman-teman Akuntansi 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah ﷻ memberikan yang terbaik untuk kita semua.
12. Teman-teman KKN unit 89 terimakasih atas pembelajaran dan pengalamannya selama KKN. Semoga Allah ﷻ selalu melindungi kalian semua.

Terimakasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga amal kebaikan selama ini bisa diberikan balasan yang terbaik dari Allah ﷻ dan semoga selalu dalam lindungan Allah ﷻ.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN	10
1.4 MANFAAT PENELITIAN	10
1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 LANDASAN TEORI	12
2.1.1 Shariah Enterprise Theory.....	12
2.1.2 Bank Syariah	14
2.1.3 Produk Penyaluran Dana Bank Syariah	17
2.1.4 Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah	21
2.1.5 Produk Jasa Bank Syariah.....	22
2.1.6 Bank Umum Syariah	23
2.1.7 Unit Usaha Syariah	23

2.1.8	Pengertian Etika	25
2.1.9	Etika Bisnis	27
2.1.10	Etika Bisnis Islam	29
2.1.11	Ethical Identity Index (EII)	41
2.2	TELAAH PENELITIAN TERDAHULU	47
2.3	PREPOSISI PENELITIAN	51
	Preposisi 1	51
	Preposisi 2	52
	Preposisi 3	54
	Preposisi 4	55
	Preposisi 5	56
	Preposisi 6	57
	Preposisi 7	58
	Preposisi 8	59
	Preposisi 9	61
2.4	MODEL PENELITIAN	62
BAB III METODE PENELITIAN		63
3.2	METODE PENGUMPULAN DATA	64
3.3	TEKNIK ANALISIS DATA	64
3.3.1	Ethical Identity Index (EII)	64
3.3.2	Uji Normalitas	65
3.3.3	Uji Homogenitas	66
3.3.4	Uji Beda	66
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		68
4.1	ETHICAL IDENTITY INDEX BUS DAN UUS	68
4.2	HASIL UJI NORMALITAS BUS DAN UUS	71
4.3	HASIL UJI HOMOGENITAS BUS DAN UUS	75
4.4	HASIL UJI BEDA BUS DAN UUS	78
4.5	PEMBAHASAN	88
BAB V PENUTUP		101
5.1	KESIMPULAN	101

5.2 SARAN	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	109



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data BUS dan UUS.....	5
Tabel 2.1 Indikator <i>Ethical Identity Index (EII)</i>	44
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	47
Tabel 4.1 Hasil Rata-rata Pengungkapan EII pada BUS dan UUS.....	68
Tabel 4.2. Hasil Rekap Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov.....	71
Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Levene's Test.....	76
Tabel 4.4 Rekap Hasil Uji Normalitas dan Uji Homogenitas.....	80
Tabel 4.5. Rekap Hasil Uji Beda Parametrik Independent T-Test.....	81
Tabel 4.6. Rekap Hasil Uji Beda Non Parametrik Uji Mann-Whitney.....	81



DAFTAR GAMBAR

2.1 Model Penelitian.....	62
---------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Sampel Bank pada BUS dan UUS
- Lampiran 2 : Hasil Perhitungan EII pada BUS
- Lampiran 3 : Hasil Perhitungan EII pada UUS
- Lampiran 4 : Hasil Uji Normalitas Dimensi Pernyataan Visi dan Misi
- Lampiran 5 : Hasil Uji Normalitas Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen
Puncak
- Lampiran 6 : Hasil Uji Normalitas Dimensi Produk dan Layanan
- Lampiran 7 : Hasil Uji Normalitas Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman
Kebajikan
- Lampiran 8 : Hasil Uji Normalitas Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan
- Lampiran 9 : Hasil Uji Normalitas Dimensi Komitmen Terhadap Debitur
- Lampiran 10 : Hasil Uji Normalitas Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat
- Lampiran 11 : Hasil Uji Normalitas Dimensi Dimesi Dewan Pengawas Syariah
(DPS)
- Lampiran 12 : Hasil Uji Normalitas *Ethical Identity Index* (EII)
- Lampiran 13 : Hasil Uji Homogenitas Dimensi Pernyataan Visi dan Misi
- Lampiran 14 : Hasil Uji Homogenitas Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen
Puncak
- Lampiran 15 : Hasil Uji Homogenitas Dimensi Produk dan Layanan
- Lampiran 16 : Hasil Uji Homogenitas Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman
Kebajikan
- Lampiran 17 : Hasil Uji Homogenitas Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan

- Lampiran 18 : Hasil Uji Homogenitas Dimensi Komitmen Terhadap Debitur
- Lampiran 19 : Hasil Uji Homogenitas Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat
- Lampiran 20 : Hasil Uji Homogenitas Dimensi Dimesi Dewan Pengawas Syariah
(DPS)
- Lampiran 21 : Hasil Uji Homogenitas pada *Ethical Indentity Index* (EII)
- Lampiran 22 : Hasil Uji Beda Independent T-Test Dimensi Pernyataan Visi dan
Misi
- Lampiran 23 : Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada Dimensi Dewan Komisaris
dan Manajemen Puncak
- Lampiran 24 : Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada Dimensi Produk dan
Layanan
- Lampiran 25 : Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada Dimensi Zakat, Sedekah
dan Pinjaman Kebajikan
- Lampiran 26 : Hasil Uji Beda Independent T-Test Dimensi Komitmen Terhadap
Karyawan
- Lampiran 27 : Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada Dimensi Komitmen
Terhadap Debitur
- Lampiran 28 : Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada Dimensi Komitmen
Terhadap Masyarakat
- Lampiran 29 : Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada Dimesi Dewan Pengawas
Syariah (DPS)
- Lampiran 30 : Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada *Ethical Indentity Index*
(EII)

ABSTRACT

The rapid development of banking turned out to cause some anxiety and questions on the application of Islamic values in Islamic banking which began to be doubted. Based to this problem, the researcher wants to conduct research to find out the disclosure of Islamic ethical identity at Sharia Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS). Then the researchers also compared the Sharia Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS) which are better between the two. This study used a sample of 12 BUS and 16 UUS, the determination of the study sample using purposive sampling. Secondary data collection on research by downloading the annual report for five years from 2014-2018 Sharia Banks (BUS) and Syairah Business Unit (UUS) from each website. This study examines the index of Islamic ethical identity disclosure using the Ethical Identity Index (EII). The results of this study indicate that Sharia Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS) there are no significant differences in the disclosure of EII and disclosures at Sharia Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS) are included as well. This study also discusses the disclosure on each dimension of EII.

Keywords: Sharia Bank, Sharia Banks, Sharia Business Units, Ethical Identity Index (EII)

ABSTRAK

Perkembangan perbankan yang semakin pesat ini ternyata menimbulkan beberapa kegelisahan dan pertanyaan pada penerapan nilai-nilai Islam pada perbankan syariah yang mulai diragukan. Dari permasalahan ini, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui pengungkapan identitas etika Islam pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Kemudian peneliti juga membandingkan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) manakah yang lebih baik diantara keduanya. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 12 BUS dan 16 UUS, penentuan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data sekunder pada penelitian dengan cara mendownload laporan tahunan selama lima tahun dari 2014-2018 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syairah (UUS) dari masing-masing websitenya. Penelitian ini menguji indeks pengungkapan identitas etika Islam menggunakan *Ethical Identity Index* (EII). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan EII dan pengungkapan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sudah termasuk baik. Pada penelitian ini juga membahas pengungkapan pada setiap dimensi EII.

Kata Kunci : Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, *Ethical Identity Index* (EII)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bisnis adalah kegiatan yang telah ada sejak zaman Rasulullah ﷺ. Bahkan Rasulullah ﷺ sendiri bekerja sebagai pebisnis yang sukses. Banyak contoh-contoh yang telah Rasulullah ﷺ ajarkan kepada umatnya mengenai tata cara bermuamalah yang baik, benar dan tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ menjadi teladan dalam berbisnis bagi seluruh umat manusia. Sebagian besar prinsip-prinsip bisnis secara Islam diambil berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Berbicara mengenai bisnis, bisnis sendiri memiliki arti suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi yang membuat, menghasilkan dan menjual barang dan jasa ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan (Juliyani, 2016). Istilah bisnis dalam Islam sendiri pada dasarnya memiliki arti hampir sama dengan bisnis secara umum, hanya saja pada bisnis secara islam ini setiap aktivitas harus di dasarkan dan tunduk patuh pada Al-Quran, dan Hadis, harus menaati batasan-batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan yang telah di contohkan oleh Rasulullah ﷺ. Menurut Sukardi dan Wijaya (2013) bisnis Islam adalah segala aktivitas dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya bahkan keuntungannya, tetapi dibatasi dalam hal cara untuk mendapatkan dan menggunakan hartanya karena ada aturan halal dan haram dan harus mematuhi.

Sekarang ini banyak sekali bisnis-bisnis yang bermunculan dan bahkan ada banyak sekali bisnis yang sukses besar. Namun, di sisi kesuksesan beberapa

pelaku bisnis tersebut terdapat sisi lain dimana ada pelaku bisnis yang menggunakan cara-cara yang melanggar norma dan etika yang berlaku di masyarakat, negara maupun agama, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Pelaku bisnis yang seperti ini tidak peduli dengan adanya hubungan antara bisnis dan etika. Mereka meyakini bahwa etika dan bisnis adalah dua hal yang berbeda, bahkan merasa dengan adanya etika yang diterapkan pada suatu bisnis akan menyebabkan semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan karena ada banyak batasan-batasan yang harus ditaati. Namun, ada juga pelaku bisnis yang meyakini bahwa bisnis dan etika memiliki hubungan yang saling berkaitan. Dimana, ketika perusahaan melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan etika yang telah ditetapkan maka bisnisnya akan semakin lancar dan akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga konsumen pun akan loyal kepada perusahaan. Pelaku bisnis yang seperti ini lah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Bisnis yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan etika yang berlaku dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Berbicara mengenai etika, secara etimologis, terminologi etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Ethos* yang memiliki arti watak kesusilaan atau adat (Hamzah, dan Hafied, 2014). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Berdasarkan pengertian di atas maka etika dapat diartikan prinsip, norma, dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang

membedakan apa yang benar dan apa yang salah (Nawatmi, 2010). Jika dihubungkan dengan etika bisnis maka dapat diartikan segala prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur sebuah bisnis dan yang membedakan apa yang benar dan yang salah dalam bisnis. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dari etika bisnis inilah akan mengatur dan memberi batasan-batasan dalam sebuah bisnis untuk boleh melakukan dan tidak boleh melakukan sesuatu hal. Etika bisnis inilah yang harus dipegang erat oleh para pelaku bisnis agar usahanya tidak hanya mendapatkan keuntungan saja tetapi juga mendapatkan nilai yang baik di mata para konsumennya. Islam sendiri menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Dalam Islam etika termasuk akhlak, yang mana seorang muslim harus menjunjung tinggi akhlak dan dari akhlak inilah yang akan mempengaruhi perilaku seseorang akan baik atau buruk. Allah ﷻ telah mengutus seorang manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini yaitu Nabi Muhammad ﷺ. Banyak hal yang Rasulullah ﷺ contohkan kepada umat manusia, salah satunya etika dalam berbisnis secara Islam. Etika bisnis Islam secara konsep sama seperti etika bisnis pada umumnya, perbedaannya terdapat pada dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Hadis. Jadi dalam etika bisnis Islam batasan-batasan mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam bisnis terdapat dalam Al-Quran dan Hadis.

Semua bisnis bertanggung jawab untuk menerapkan etika dalam setiap aktivitasnya, termasuk juga bisnis yang berbasis syariah dalam menjalankan aktivitasnya maka memiliki tanggungjawab lebih besar untuk menerapkan etika

dalam aktivitas bisnisnya. Seperti bisnis disektor perbankan syariah. Hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan etika bisnis Islam. Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik perbankan syariah adalah suatu hal yang mutlak harus dipenuhi menurut tuntunan syariat agama Islam dan sebagai pembeda antara bank konvensional dan syariah. Jika perbankan syariah tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam dengan benar maka akan kehilangan nilai lebih yang dimiliki oleh perbankan syariah bila dibandingkan dengan perbankan konvensional, hingga pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup perbankan syariah dimasa depan (Putritama, 2018).

Perbankan syariah yang pertama kali di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, yang berdiri pada 1 November 1991 dan pada tanggal 1 Mei 1992 resmi beroperasi. Tahun 1998, Undang-undang No.7 Tahun 1992 disempurnakan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998, menegaskan dengan jelas bahwa di tanah air terdapat dua sistem yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Penyempurnaan undang-undang pun menjadi awal mulai berdirinya beberapa Bank Syariah, yaitu Bank BRI, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dll. Minat masyarakat untuk melakukan transaksi di bank syariah pun meningkat pesat, banyak masyarakat yang selama ini merasa gelisah dengan sistem di perbankan konvensional yang tidak sesuai dengan syariat Islam akhirnya berpindah ke bank syariah. Perkembangan bank syariah pun semakin pesat, karena semakin banyak masyarakat yang memahami sistem keuangan Islam dan bahaya riba. Sekarang ini semakin banyak bank syariah, namanya pun semakin dikenal oleh masyarakat dan

bisa dikatakan bank syariah sekarang ini hampir menandingi bank konvensional. Akhirnya bank konvensional mulai timbul rasa kekhawatiran sehingga banyak bank-bank konvensional yang membuka unit usaha syariah.

Tabel 1.1
Data BUS dan UUS

	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah	13	13	14	14
Unit Usaha Syariah	21	21	20	20

Sumber Data : Statistik Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2019
Website OJK

Semakin banyaknya perbankan syariah di Indonesia maka semakin besar pula tantangan perbankan syariah untuk bersaing antara satu perbankan syariah dengan yang lainnya. Putritama (2018) menyebutkan dalam jurnalnya terdapat 16 tantangan perbankan syariah yang harus dihadapi dan ditangani demi kelangsungan perbankan syariah agar kepercayaan masyarakat mengenai perbankan syariah tidak menurun.

Pangsa pasar perbankan syariah juga semakin berkembang, namun hal ini tidak diikuti dengan penerapan etika bisnis Islam yang harusnya semakin diterapkan dalam perbankan syariah dan informasi penerapan prinsip etika bisnis Islam ini harusnya diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam laporan tahunan perbankan syariah ini harus memiliki nilai-nilai syariah yang megindikasikan bahwa perbankan syariah ini telah menghadirkan dan menaati peraturan yang Allah ﷻ tetapkan dan Rasulullah ﷺ contohkan untuk melakukan

sebuah bisnis. Peran pengungkapan nilai-nilai syariah dalam laporan tahunan perbankan syariah sendiri sangat penting bagi keberlangsungan perbankan syariah, karena laporan tahunan perbankan syariah adalah sumber informasi yang berguna dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Mengungkapkan nilai-nilai Islam dalam laporan tahunannya harus diungkapkan secara transparan. Ketika perbankan syariah mengungkapkan nilai-nilai Islam secara transparan maka perbankan syariah akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, stakeholder dan memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi.

Menurut Srairi (2019) menyatakan bahwa bank-bank yang lebih transparan mencerminkan derajat pengungkapan yang diatur, dan dapat meningkatkan stabilitas sistem bank. Jika nilai-nilai syariah tidak diungkapkan dalam laporan tahunan perbankan syariah maka perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, karena letak perbedaan perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah pada penerapan nilai-nilai syariahnya dan itulah yang menjadi keunggulan tersendiri untuk perbankan syariah. Nilai-nilai syariah tidak hanya diungkapkan saja namun juga harus diterapkan dalam setiap aktivitas dalam perbankan syariah, mulai visi dan misinya, budaya perusahaannya, produk dan layanannya, transaksinya, aktivitas investasinya, dll.

Berbicara mengenai pengungkapan nilai-nilai syariah dalam laporan tahunan perbankan syariah ada hal berbeda yang diungkapkan oleh Paramitasari (2012) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laporan tahunan perbankan syariah tidak sepenuhnya menunjukkan perwujudan nilai-nilai Islam. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Haniffa & Hudaib (2007) juga menunjukkan bahwa rata-rata skor EII di bawah 50% hal ini menunjukkan bahwa masih belum sesuainya perbankan syariah dalam pelaksanaan prinsip identitas etis Islam. Bahkan menurut Tafri, Rahman, dan Omar (2011:89) berpendapat *“In practice, Islamic banks offer products which are quite similar to the conventional banks and emulate the practices of the conventional banks”*. Kemudian hal serupa juga diungkapkan Siddiqui (2008:692) *“In practice, Islamic banks engage in a hybrid model of traditional and Islamic savings and investment instruments”*. Berarti hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah ini belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai syariah di dalamnya. Ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan jika memang benar terjadi, karena perbankan syariah sudah menggunakan kata “syariah” yang mana kata itu memiliki tanggungjawab yang besar baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki tanggung jawab yang besar baik kepada manusia maupun kepada Allah ﷻ, seharusnya perbankan syariah harus benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap detail aktivitasnya. Seperti yang diungkapkan oleh Putra dan Wijayanti (2020) menyatakan laporan tahunan bank syariah harus memiliki nilai syariah yang mengindikasikan kehadiran elemen Ilahi sebagai parameter yang baik untuk kegiatan bisnis. Karena, banyak masyarakat muslim berpindah dari perbankan konvensional ke perbankan syariah hanya karena ingin lebih menaati Allah dan Rasulnya dalam mengelola dan menyimpan asetnya. Jika memang hal ini benar terjadi dan perbankan syariah menggunakan kata “syariah” hanya sebagai label saja, seperti

yang diungkapkan Farooq (2007) yang menyatakan kebanyakan dari bank syariah sekarang ini sibuk mengemas produk-produk perbankan konvensional dengan label Islam, maka hal ini benar-benar sangat memprihatinkan. Hal ini menyebabkan timbulnya pertanyaan banyak pihak mengenai penerapan nilai-nilai syariah dalam perbankan syariah apakah sudah benar-benar diterapkan atau belum. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Paramitasari (2012) yang menyatakan bahwa seiring berkembangnya perbankan syariah ini, muncul berbagai kontroversi dari masyarakat, dimana masalah yang paling banyak muncul adalah pelekatan label syariah pada institusi keuangan Islam dimana banyak yang masih menganggap belum layak. Menurut Prasetyaningsih (2010 dalam Paramitasari 2012) hal ini timbul karena persepsi masyarakat yang masih ragu pada konsistensi bisnis syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam aktivitas bisnisnya.

Seiring berjalannya waktu, dimana banyak pertanyaan yang timbul mengenai penerapan nilai-nilai syariah dalam perbankan syariah, hal lain yang harus dihadapi oleh perbankan syariah adalah pelanggaran yang terjadi dalam perusahaannya sendiri. Dimana, angka kejadian *fraud* dalam perbankan syariah rata-rata selama periode 2011-2017 sebesar 9,87 kasus per tahun (Ernawati, 2019). Hal serupa juga diungkapkan oleh Astuti, Rozali, Cakhyaneu (2019) menyatakan bahwa ternyata penipuan itu selalu terjadi setiap tahun pada BUS dan UUS. Ini juga membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam perbankan syariah masih belum maksimal. Padahal penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap kegiatan bisnis bank syariah adalah hal yang sangat penting karena banyak

masyarakat yang mempercayakan bank syariah untuk mengelola dan menyimpan asetnya karena penerapan nilai-nilai syariahnya. Dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah ini merupakan hal yang vital dimana hal ini akan memberikan dampak bertambahnya nasabah bank syariah dan akan mengakibatkan keuntungan bank syariah akan semakin meningkat (Nugroho, Kuncoro, Mastur 2019).

Berdasarkan latarbelakang di atas membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengungkapan identitas etika Islam dalam laporan tahunannya pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), penulis ingin mengetahui dengan membandingkan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) manakah yang lebih menerapkan dan mengungkapkan identitas etika Islam dalam laporan tahunannya. Jika dilihat dari penjelasan di atas terdapat banyak kegelisahan, keraguan, dan pertanyaan mengenai penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah. Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh sehingga penulis melakukan penelitian mengenai **“Perbandingan Pengungkapan Identitas Etis Islam pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Perbankan di Indonesia khususnya BUS dan UUS sudah mengungkapkan Identitas Etika Islam dalam laporan tahunannya?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengungkapkan Identitas Etika Islam dalam laporan tahunan pada BUS dan UUS?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui Pengungkapan Identitas Etika Bisnis Islam dalam laporan tahunan pada BUS dan UUS.
2. Untuk mengetahui perbedaan dalam pengungkapan Identitas Etika Islam dalam laporan tahunan pada BUS dan UUS.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh pihak yang melakukan penelitian terkait pengungkapan etika bisnis Islam di sektor perbankan.

2. Manfaat praktisi

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wadah pembelajaran bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan.

- b) Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, masukan dan evaluasi mengenai pengungkapan identitas etika Islam dalam laporan tahunannya di BUS dan UUS sehingga kedepan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penerapan dan pengungkapan identitas etika Islam pada laporan tahunannya.

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab dua menjelaskan tentang teori yang digunakan sebagai landasan dari penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan preposisi penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab tiga ini berisi metode penelitian yang terdiri dari populasi yang digunakan, metode pengumpulan data dan teknik analisis data dalam penelitian ini.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat ini diuraikan hasil dari penelitian dan terdapat pembahasan yang menjelaskan deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab lima berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Shariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory (SET) ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Triyuwono. SET ini dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan (Triyuwono, 2011). Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu saja yaitu kepada pemegang saham tetapi juga kepada pihak lainnya yaitu *stakeholders* yang lebih luas. Menurut Triyuwono (2011) *stakeholders* pada SET yaitu Tuhan, manusia dan alam. Adapun penjelasan Tuhan, manusia dan alam menurut SET adalah sebagai berikut:

a) Tuhan

Tuhan ditempatkan sebagai stakeholder tertinggi, dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi maka segala aktivitas dan perilaku yang dilakukan akan dilakukan semata-mata untuk menambah ketaatan kepada Tuhan. Menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi maka konsekuensinya harus menggunakan dasar aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Tuhan dalam melaksanakan aktivitasnya.

b) Manusia

Direct stakeholder dan *indirect stakeholder* merupakan pengelompokan manusia dalam teori ini. Pihak yang memberikan kontribusi secara langsung

kepada perusahaan, baik secara keuangan maupun non keuangan adalah arti dari *direct stakeholder*. Dengan memberikan kontribusi pada perusahaan, maka *direct stakeholder* memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. *Indirect stakeholder* merupakan pihak yang tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, tetapi secara syariah memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

c) Alam

Alam ini salah satu stakeholder yang penting juga untuk keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dapat dibangun dan ada karena didirikan di atas bumi dan menggunakan energi yang dimiliki dan disediakan oleh alam. Oleh karena itu, alam memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Namun bentuk kesejahteraan yang diberikan bukan seperti yang diberikan kepada manusia, kesejahteraan yang diberikan kepada alam berupa kepedulian terhadap kelestarian alam, mencegah kerusakan, dan pencemaran.

Jadi *Shariah Enterprise Theory* (SET) ini dapat dipahami bahwa dalam SET tidak menjadikan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu, tetapi SET menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu itu. Hukum dan aturan Tuhan lah yang dijadikan pedoman dalam menjalankan setiap aktivitas, karena tempat kembali manusia dan alam adalah kepada Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus dan wajib menaati dan menjalankan setiap perintah dari Tuhan dan menjahui larangannya. Tuhan harus dijadikan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia (Triuwono, 2011).

2.1.2 Bank Syariah

Perbankan syariah yang pertama kali di dirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, bank ini berdiri pada tanggal 1 November 1991. Setelah pendirian Bank Muamalat Indonesia ini, pada akhir 1990-an mulailah bank syariah ini berkembang pesat. Pengertian Bank Syariah sendiri yang ditulis oleh Ascarya dan Yumanita (2010) mengatakan bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Menurut Putra dan Wijayanti (2020) perbankan syariah merupakan bank yang dalam melakukan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, berdasarkan undang-undang dan fatwa yang dikeluarkan lembaga resmi.

Perkembangan bank syariah di Indonesia yang tergolong pesat ini, karena adanya keyakinan yang kuat dari masyarakat muslim di Indonesia bahwa perbankan konvensional dalam menjalankan operasionalnya masih mengandung riba. Mulai berpindahannya dan mulai percayanya masyarakat muslim di Indonesia dengan bank syariah karena bank syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam bank syariah juga harus menunjukkan kepatuhan syariah dalam menjalankan seluruh aktivitasnya, menurut Kasim dan Bukido (2018) kepatuhan syariah adalah kondisi dimana perbankan syariah harus secara penuh menerapkan keseluruhan aspek prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan setiap kegiatan perbankan syariah. Kepatuhan syariah ini adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perbankan syariah. Dimana

ketika perbankan syariah tidak menjalankan kepatuhan syariah dalam setiap kegiatannya maka hal ini sama saja dengan pencederaan atau pelanggaran bank terhadap berbagai karakter dasar dari perbankan syariah itu sendiri.

Perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki perbedaan dalam kelembagaannya. Dalam kelembagaan perbankan syariah, terbagi menjadi tiga yaitu BUS, UUS, dan BPRS (Ascarya, dan Yumanita, 2010), yaitu:

1) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) ini kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang berdasarkan pada prinsip syariah. BUS adalah badan usaha yang setara dengan bank konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

2) Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) mempunyai letak sendiri pada struktur organisasi yaitu berada pada satu tingkat di bawah direksi bank konvensional yang bersangkutan. UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional, berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki posisi yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. BPRS merupakan bank yang menjalankan kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas

pembayaran, dan dalam melaksanakan kegiatannya BPRS berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah dan bank konvensional selain memiliki perbedaan kelembagaannya, juga ada hal yang membedakan lainnya yaitu dalam bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini merupakan dewan yang setingkat dengan dewan komisaris independen. DPS ini dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Ascarya, dan Yumanita, 2010). DPS ini memiliki tugas utama yaitu mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun fungsi DPS (Ascarya; dan Yumanita, 2010) adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, UUS, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah;
- 2) Mengawasi secara aktif dan pasif dalam melaksanakan fatwa-fatwa DSN dan memberikan pengarahan, meneliti, dan membuat rekomendasi atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah;
- 3) Menjadi mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya setahun sekali; dan
- 4) Menjadi perwakilan dari DSN yang ditempatkan pada bank, dan wajib untuk melaporkan secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali

mengenai kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya.

Penetapan anggota dari DPS biasanya dilakukan pada RUPS, setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari DSN. DSN sendiri merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas dan wewenang memastikan kesesuaian produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah (Ascarya, dan Yumanita, 2010).

2.1.3 Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2004) bank syariah dalam menyalurkan dana menggunakan metode seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. Dalam kegiatan penyaluran dana pada nasabah, pembiayaan bank syariah yang dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya, adalah sebagai berikut:

1) Prinsip jual-beli

Perpindahan kepemilikan barang merupakan dasar pelaksanaan dari prinsip ini. Perolehan keuntungan yang didapatkan bank pun ditentukan di awal dan menjadi bagian harga jual barang kepada nasabah. Pada transaksi jual-beli ini ada tiga jenis transaksi, yaitu:

a. Bai'al-Murabahah

Murabahah adalah jual-beli barang yang mana harga barang adalah harga beli bank dari produsen ditambah dengan keuntungan (*mark-up*) dan keuntungannya tersebut disepakati oleh kedua belah pihak (pihak bank

dan pihak nasabah). Dalam *murbahah* pembayarannya ini biasanya dilakukan secara cicilan (*bitsaman ajil*) dan penyerahan barang diberikan setelah akad.

b. *Bai' as-Salam*

Salam merupakan transaksi jual-beli barang dimana barang yang diperjual-belikan belum ada. Pembayarannya dilakukan secara tunai di awal akad atau bisa juga dilakukan secara cicilan dengan syarat harga jual barang dan jangka waktu pembayaran barang harus di sepakati kedua belah pihak. Harga jual barang yang ditetapkan bank pun merupakan harga beli ditambah dengan keuntungan.

c. *Bai'al-Istishna*

Istishna merupakan akad yang ketentuan dan aturan nya mengikuti *akad bai'as-salam*. Biasanya, jenis ini digunakan dibidang manufaktur dan kontruksi. Pembayaran dalam *akad istishna* ini dilakukan dalam beberapa kali pembayaran. Dalam akad ini juga memiliki ketentuan umum yang mana spesifikasi barang yang dipesan harus jelas.

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

a. *Ijarah*

Pemindahan manfaat barang dan jasa, dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri merupakan pengertian dari *akad ijarah*. Jadi transaksi *ijarah* ini dasarnya transaksi jual-beli tetapi perbedaannya terdapat pada objek transaksinya yaitu jasa,

sedangkan pada jual-beli adalah barang. Harga sewa di sepakati di awal pada perjanjian kedua belah pihak.

b. *Al-Ijarah Al-Muntahia bit-tamlik*

Al-Ijarah Al-Muntahia bit-tamlik merupakan prinsip sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Jadi bank bisa menjual barang yang disewakan kepada nasabah di akhir masa sewanya, tetapi dengan ketentuan pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah sudah menyepakati harga sewa dan harga jual.

3) Prinsip Bagi Hasil

a. *Al-Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Mengenai kontribusi yang diberikan dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang dagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau *intangible asset*.

b. *Al-Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak yang mana ada pihak pertama yang meberikan modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usahanya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituliskan di dalam kontrak. Sedangkan mengenai kerugian apabila kerugian bukan akibat kelalaian dari pengelola maka kerugian merupakan

tanggung jawab pemilik modal dan jika kerugian diakibatkan kelalaian dari pengelola maka ditanggung oleh pihak pengelola.

4) Akad Pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi ditujukan untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan. Namun dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya yang dikelurakan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya biaya yang dikeluarkan sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

a. *Al-Hiwalah*

Hiwalah adalah pemindahan hutang kepada orang yang berkewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang.

b. *Ar-Rahn*

Rahn adalah menahan jaminan salah satu harta milik peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang menjadi jaminan pun harus barang yang memiliki nilai ekonomis dan memenuhi kriteria 1) milik nasabah sendiri; 2) ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dan 3) tidak boleh dimanfaatkan tetapi dapat dikuasai oleh bank.

c. *Al-Qardh*

Qardh merupakan pinjaman uang kepada orang lain yang dapat diminta kembali dan tanpa mengharapkan imbalan. Transaksi *qardh* ini termasuk kategori saling membantu dan bukan transaksi komersial.

d. *Al-Wakalah*

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Pihak pertama memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak kedua, namun hanya sebatas yang diberikan oleh pihak pertama, dan jika pihak kedua dapat melaksanakan kuasa atau wewenang yang diberikan dengan baik, maka semua resiko dan tanggungjawab atas dilaksanakannya perintah tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama yang memberikan kuasa.

e. *Al-Kafalah*

Kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.

2.1.4 Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Dalam penghimpunan dana, mobilisasi dan investasi tabungan dilakukan oleh bank syariah dengan tujuan untuk membangun perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak. Dalam produk penghimpunan dana ini terdapat dua prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu: (Ascarya, dan Yumanita, 2010).

a. *Al-Wadiah*

Al-wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan jika diminta oleh si penitip. Prinsip *wadiah* yang diterapkan pada produk rekening giro adalah *wadiah yad dhamamah*. *Wadiah yad dhamamah* prinsipnya harta yang dititipi boleh dimanfaatkan. Berbeda dengan *wadiah amanah*

yang mana prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi (Sudarsono, 2004:57-58)

b. *Al Mudharabah*

Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian. Jadi bank sebagai pihak pengusaha menerima uang dari pemilik modal dengan tujuan untuk dapat dikelola dan digunakan usaha oleh pihak pengusaha. Keuntungannya pun dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan untuk kerugian sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak (Ascarya, dan Yumanita, 2010)

2.1.5 Produk Jasa Bank Syariah

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jenis jasa perbankan menurut Sudarsono (2004) sebagai berikut:

a. *Al-sharf*

Sharf adalah penjanjian jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi ini dapat dilakukan pada mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

b. *Al-Ijarah*

Ijarah adalah menyewakan kontan simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen kemudian, bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa yang diberikan tersebut.

2.1.6 Bank Umum Syariah

BUS adalah badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. BUS seperti halnya bank konvensional, dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa. Pengertian BUS adalah bank yang memberikan kegiatan usaha jasa lalu lintas pembayaran dan dalam melaksanakannya berdasarkan prinsip syariah. Ketika BUS ingin memperoleh ijin usaha maka harus memenuhi persyaratan yang sudah dituliskan pada Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sekurang-kurangnya tentang a) susunan organisasi dan kepengurusan, b) permodalan, c) kepemilikan, d) keahlian dibidang perbankan syariah, dan e) kelayakan usaha.

Pada Bank Umum Syariah (BUS) memiliki larangan-larangan yang diatur dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 pasal 24 tentang Perbankan Syariah yang mana Bank Umum Syariah dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- 2) Melakukan kegiatan jual beli sahan secara langsung dipasar modal
- 3) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

2.1.7 Unit Usaha Syariah

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip, syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa. Sebagai suatu unit kerja khusus, unit usaha syariah memiliki tugas untuk a) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah, b) melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah, c) menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah, dan d) melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

Pada UUS memiliki larangan-larangan yang diatur dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 pasal 24 tentang perbankan syariah yang mana UUS dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- 2) Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung dipasar modal
- 3) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

2.1.8 Pengertian Etika

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat (Hamzah dan Hafied 2014). K. Bertens (dalam Hamzah dan Hafied (2014)) menjelaskan lebih detail mengenai etika, yang mana etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Ethos* yang berarti bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, watak, akhlak sikap, perasaan, dan tatacara berfikir, dan *Ta Etha* sebagai bentuk jamaknya yang berarti kebiasaan, akhlak, atau watak. Pada pengertian etimologis etika ini berhubungan dengan upaya untuk menentukan tingkah laku manusia. Etika secara umum merujuk pada baik buruknya tingkah laku manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang mana menjadi referensi utama dalam pengambilan keputusan individu sebelum melakukan suatu kegiatan (Juliyani, 2016).

Menurut Al-Ghazali etika adalah sebagai praktik utama sains, karena jika seseorang tidak dapat mengelola jiwanya maka dia tidak akan bisa mengelola hubungannya dengan orang lain. Pengetahuan etis dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, ketika seseorang sudah tau tentang dirinya maka dia akan tau sang pencipta. Dan sumber utama pengetahuan adalah Tuhan dan seseorang dapat mengembangkan jiwanya menuju ke titik dimana dia berada dekat dengan Tuhan nya (Sidani dan Al Ariss, 2015). Etika ini membahas nilai dan norma, moral yang mengatur interaksi perilaku manusia baik sebagai individu maupun kelompok yang mana etika ini merupakan cabang dari filsafat. Di dalam pemahaman ini, etika digunakan sebagai landasan manusia dalam berperilaku dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Muslich, 2004):

- 1) Sebagai refleksi secara kritis terhadap norma dan moralitas
- 2) Sebagai refleksi aplikatif atas norma dan moralitas.

Maksud dari refleksi secara kritis terhadap norma dan moralitas berarti upaya manusia dalam penilaian etika perilaku yang bersifat filosofis yang sesuai dengan perkembangan fenomena yang bersifat mendasar tentang kehidupan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Sedangkan maksud dari refleksi aplikatif atas norma dan moralitas adalah lebih ditunjukkan untuk penerapan dan mensosialisasikan ke dalam kehidupan dan pergaulan antar manusia dan lingkungannya yang bersifat dinamis dan cenderung mengalami perubahan (Muslich, 2004).

Secara umum etika memiliki arti prinsip, aturan, norma, dan standar perilaku yang mengatur individu ataupun kelompok yang mana berfungsi untuk membedakan perilaku mana yang benar dan yang salah. Jika perilaku seseorang atau kelompok diterima dan menguntungkan bagi banyak pihak dan tidak merugikan orang maka termasuk perilaku yang etis karena mendapatkan manfaat yang positif. Sebaliknya jika banyak pihak yang dirugikan dari perilaku seseorang atau kelompok, maka akan ditolak karena akan membawa dampak negatif bagi banyak orang dan perilaku inilah dinilai sebagai perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, aturan etika merupakan pedoman dalam berperilaku di dalam masyarakat.

2.1.9 Etika Bisnis

Penerapan etika dalam suatu bisnis saat ini merupakan hal yang penting. Karena dengan tingkat persaingan yang semakin ketat ditambah dengan konsumen sekarang yang semakin kritis, maka kepuasan konsumen menjadi hal yang penting untuk selalu dijaga dan akan berdampak pada kepercayaan konsumen kepada perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu bisnis sekarang ini sangat memerlukan penerapan etika yang baik dan sesuai dengan prinsipnya. Dimana hal tersebut dilakukan untuk mengendalikan perilaku-perilaku buruk dalam berbisnis diperlukan etika untuk mengendalikannya. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya etika merupakan prinsip, aturan, norma, dan standar perilaku yang mengatur individu ataupun kelompok yang mana berfungsi untuk membedakan perilaku mana yang benar dan yang salah. Arti bisnis sendiri menurut Mardatillah (2013) adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut produksi, menjual, dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dasar pemikiran bisnis adalah pertukaran timbal balik yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Jika diartikan etika bisnis sendiri memiliki arti aplikasi etika umum yang mengatur bisnis (Muslich, 2004). Etika bisnis ini berusaha untuk melarang perilaku bisnis, manajer perusahaan dan pekerja untuk tidak melakukan sesuatu. Etika bisnis memiliki konsep yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan etika bisnis dan dapat diterapkan dengan pendekatan etika bisnis yang Islami. Konsep etika bisnis ini pun dijelaskan menurut Muslich (2004) yaitu:

1) Prinsip Otonomi

Para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya memiliki kebebasan dalam memilih untuk menggunakan sumber daya yang tersedia atau sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan dalam rangka untuk mencapai tujuan bisnisnya. Keputusan yang diambil oleh pelaku bisnis dalam memanfaatkan sumber daya ini memiliki kebebasan untuk memilih menggunakan sumber daya yang mana, disinilah para pengambil keputusan memiliki kewenangan tertentu yang bebas secara otonom. Namun, apapun keputusan yang diambil dan dengan kebebasan yang ada pasti ada pertanggung-jawaban yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis ini.

2) Kejujuran

Sikap kejujuran ini adalah sikap yang wajib dimiliki oleh para pelaku bisnis. Bahkan sikap kejujuran merupakan modal utama untuk para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya agar mendapatkan kepercayaan dari konsumennya, maupun dari partner bisnis.

3) Niat Baik dan Tidak Berniat Jahat

Dalam mendirikan sebuah bisnis tidak boleh ada niat jahat sedikitpun. Karena hal itu dapat merugikan konsumen atau masyarakat. Jadi, niat yang harus tertanam dari awal adalah niat yang baik. Niatan dari didirikannya sebuah bisnis dapat terlihat dari cukup transparannya misi, visi dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis. Dari misi, dan visi yang dirumuskan tersebut akan menjadi bahan ukur bagi masyarakat untuk menilai niatan yang dijelaskan dan dilaksanakan atau tidak.

4) Adil

Sikap adil ini merupakan salah satu prinsip yang cukup penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Semua pelaku bisnis harus mempunyai sikap adil kepada semua pihak. Sedikitpun sikap dan perilaku yang dilakukan jangan mengandung ketidakadilan. Sebab ketidakadilan merupakan sumber kegagalan yang akan dialami perusahaan atau pelaku bisnis.

5) Hormat pada Diri Sendiri

Prinsip hormat pada diri sendiri ini adalah cerminan penghargaan yang positif pada diri sendiri. Dalam melakukan hormat pada diri sendiri ini tentu dimulai dengan penghargaan seseorang terhadap orang lain. Jadi sebelum seseorang menghargai diri sendiri maka terlebih dahulu untuk menghargai orang lain.

2.1.10 Etika Bisnis Islam

Islam sangat menjunjung tinggi etika. Dasar etika Islam adalah pemahaman dan interpretasi muslim Quran dan praktik Nabi Muhammad (sunnah), yang mendorong untuk tunduk kepada Allah ﷻ. Komponen mendasar dari etika Islam adalah gagasan bahwa setiap manusia itu dituntut untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat di dalam semua aspek kehidupan (Quttainah dan Almutairi, 2017). Pengertian etika dalam Islam adalah akhlak, yang mana akhlak merupakan cerminan kepercayaan iman seseorang. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang maka orang tersebut memiliki akhlak/etika yang semakin baik. Allah ﷻ pun sudah mengutus seorang manusia yang memiliki akhlak yang sempurna dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia yaitu Nabi Muhammad ﷺ. Hal ini sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam Q.S Al-

Ahzab ayat 21 yang artinya “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”

Nabi Muhammad ﷺ juga diutus dimuka bumi ini karena untuk menyempurnakan akhlak umat muslim. Oleh karena itu, umat muslim sendiri sudah memiliki panutan terbaik untuk bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan syariat Islam yaitu Nabi Muhammad ﷺ. Nabi Muhammad ﷺ juga mencontohkan bagaimana etika dalam berbisnis. Karena Nabi Muhammad ﷺ sendiri merupakan seorang pebisnis yang sukses, sehingga sudah sangat tepat jika umat muslim menjadikan Nabi Muhammad ﷺ sebagai teladan dalam melakukan bisnis.

Etika bisnis dalam Islam sendiri menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan (Mardatillah, 2013). Pengertian lain dari etika bisnis Islam menurut Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya (Juliyani, 2016). Secara garis besar etika bisnis Islam adalah suatu prinsip, aturan, dan norma yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur segala aktivitas bisnis, dan para pelaku bisnis. Etika bisnis Islam ini berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, sehingga ukuran kebaikan dan tidak baik bersifat mutlak, dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad ﷺ. Dalam etika bisnis Islam ini memiliki orientasi yang berbeda dengan etika bisnis yang konvensional. Etika bisnis Islam ini memiliki tujuan lain

selain untuk mendapatkan keuntungan yaitu untuk beribadah kepada Allah ﷻ dan untuk mendapatkan ridho Allah ﷻ, pertanggungjawabannya pun tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat.

Dalam bertransaksi etika memang harus benar-benar diterapkan dalam berbisnis karena sekarang ini sudah banyak terjadi kerusakan moral yang semakin meluas, banyak kejadian-kejadian yang tidak etis dilakukan oleh para pelaku bisnis yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Selain itu, dengan perkembangan teknologi sekarang ini, konsumen menjadi semakin kritis yang membuat bahwa perusahaan sekarang ini harus mulai memperhatikan etika bisnis karena akan sangat mempengaruhi kualitas layanan perusahaan kepada konsumennya. Pentingnya pengungkapan dan penerapan etika pada bisnis juga diungkapkan oleh Sukardi dan Wijaya (2013) yang menyatakan bahwa pengungkapan etika dalam bisnis harus diperhatikan dan dilakukan karena pengungkapan etika pada bisnis memiliki nilai informasi dan meningkatkan nilai pemegang saham, sementara penerapan etika pada bisnis memiliki dampak positif peningkatan kepuasan dari stakeholder. Berbisnis sendiri merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya pun bekerja sebagai pebisnis. Hamzah, dan Hafied, (2014) menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etika yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ diantaranya:

1) Menghindari perbuatan Riba

Secara bahasa arti riba adalah “bertambah”. Perbuatan riba adalah meminta tambahan dari harta pokok yang dipinjamkan kepada seseorang atau dalam hal tukar menukar barang. Dalam berbisnis tidak diperbolehkan ada tambahan/riba ini, karena hal ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam, sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275.

2) Memberikan Sedekah/Zakat

Sedekah adalah pemberian secara sukarela tanpa dibatasi jumlah dan waktu dari seseorang kepada orang lain, sebagai suatu kebaikan yang mengharapkan ridha Allah ﷻ dan mengharapkan pahala. Dalam berbisnis selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan juga harus menjalankan fungsi sosial yang baik salah satunya adalah melalui sedekah. Sedekah ini merupakan perbuatan yang hukumnya adalah sunnah. Hal ini didasari pada Q.S Al-Baqarah ayat 280.

3) Berbisnis atas Dasar Keridhaan

Keridhaan dalam melakukan transaksi merupakan unsur yang penting terutama dalam sistem ekonomi syariah. Karena Allah ﷻ sendiri berfirman pada Q.S Al-Nisa ayat 29 yang dapat diketahui bahwa pentingnya keridhaan atau kerelaan dalam bertransaksi dan hal ini merupakan hal yang sangat mendasar karena dalam bertransaksi harus didasari prinsip suka sama suka atau kesepakatan antara kedua belah pihak atau yang bertansaksi dan berlangsung secara sukarela tanpa adanya pemaksaan.

4) Bertindak Amanah

Arti dari kata amanah adalah jujur dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan bisnis para pelaku bisnis dituntut untuk amanah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ yang mana ketika berdagang selalu jujur dalam menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari barang yang dijualnya sehingga banyak konsumen yang percaya dengan Rasulullah ﷺ. Amanah ini merupakan salah satu kunci dalam berbisnis. Sikap amanah inipun juga diperintahkan oleh Allah ﷻ dan salah satunya terdapat pada Q.S Al-Anfal ayat 27.

5) Menepati Janji

Dalam bahasa arab istilah “janji” ini disebut ‘*akd*. ‘*Akd* artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Jadi, pengertian akad adalah ijab kabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad ini menempati posisi yang sangat penting dalam melakukan transaksi muamalah karena terjadi tidaknya dan sah atau tidaknya suatu transaksi tergantung pada kejelasan dan ketegasan akad yang dilakukan.

6) Berlaku Adil

Adil memiliki arti tidak memihak, tidak pilih kasih dan tidak sewenang-wenang. Dalam menjalankan bisnis keadilan ini merupakan tujuan dari penerapan sistem ekonomi syariah. Keadilan yang dimaksudkan disini adalah para pelaku bisnis tidak diperkenankan untuk memonopoli usaha, menimbun barang, tidak menunaikan zakat yang harusnya diberikan kepada yang membutuhkan, tidak mengurangi timbangan, dll. sehingga sikap adil ini harus menjadi prinsip bagi para pelaku bisnis. Prinsip keadilan ini pun diambil dari

firman Allah ﷻ yang memerintahkan hambanya untuk berperilaku adil salah satunya pada Q.S Al-Maidah ayat 8.

7) Menolak Tindakan Gharar

Gharar dari bahasa arab yang artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Tindakan gharar ini merupakan tindakan yang dilarang oleh agama.

8) Menjauhi Tindakan Zalim

Tindakan kezaliman merupakan tindakan yang harus dihindari dalam melakukan transaksi muamalah. Karena tindakan kezaliman ini akan berdampak pada kekecewaan, kerugian bahkan dapat membawa dampak buruk pada masyarakat banyak. Salah satu contoh tindakan kezaliman adalah menimbun barang (*ihthiar*) dengan tujuan penjual tersebut akan menaikkan harga barangnya jika terjadi kelangkaan barang tersebut, memalsukan uang atau barang merupakan salah satu tindakan kezaliman juga. Dampak dari tindakan kezaliman ini dapat merugikan orang banyak. Oleh karena itu, menghindari tindakan zalim adalah salah satu nilai etika Islam. Dalam Q.S. Al-Syura ayat 42 pun Allah ﷻ memperingatkan kepada manusia yang melakukan kezaliman akan mendapatkan azab yang pedih.

9) Melakukan Ibra

Ibra dari bahasa arab yang artinya melepaskan, mengikhlaskan dan menjauhkan diri dari sesuatu. Hal ini memiliki makna pemberi hutang menghapuskan hutang seseorang. Ini sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280 yang mengartikan pemulihan utang atas yang memiliki

hutang dapat dilakukan dengan menghibahkan atau menyedekahkan hutang tersebut, baik sebagian atau seluruhnya. Dengan terjadinya ibra ini menjadi salah satu nilai etika Islam.

10) Memberikan Ujrah

Imbalan atau upah merupakan pengertian dari ujrah. Dalam hal ini pemberian upah atau imbalan harus diberikan segera kepada para karyawan sebelum keringatnya kering. Dan dalam pemberian upah tidak boleh ditunda-tunda (Nawatmi, 2010).

11) Menolak Tindakan Maisir

Maisir merupakan suatu permainan yang mengandung usur taruhan dan orang yang menang dalam permainan tersebut berhak mendapatkan taruhan tersebut. Tindakan ini adalah tindakan yang dilarang oleh Allah ﷻ dan dalam kegiatan berbisnis pun tidak boleh diterapkan dan menghindarinya adalah hal yang sangat diutamakan. Dalam Al-Quran pun terdapat peringatan mengenai tindakan maisir ini salah satunya pada Q.S Al-Baqarah ayat 219.

12) Tidak melakukan Sumpah Palsu

Nabi Muhammad ﷺ sangat melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam transaksi muamalah. Hal ini sesuai dengan salah satu HR. Bukhari, Nabi Muhammad ﷺ bersabda, “Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis sangat banyak dilakukan namun hal ini sangat dilarang dalam ajaran Islam walaupun mendatangkan keuntungan yang besar namun hasilnya tidak berkah. (Nawatmi, 2010).

13) Harus Bersikap Ramah-Tamah, Tolong Menolong dan Toleransi.

Para pelaku bisnis harus bersikap ramah tamah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Ketika pelaku bisnis bersikap ramah tamah maka ini akan menjadi nilai tambah bagi bisnis tersebut. Kemudian tolong menolong dan toleransi juga harus diterapkan dalam kegiatan bisnis. Walaupun bisnis sebagian besar tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan namun jangan lupa bahwa para pelaku bisnis juga merupakan hamba Allah ﷺ yang harus menjalankan perintahnya dan harus saling tolong menolong satu sama lain. Hal ini sesuai dengan HR. Bukhari dan Tarmizi “Nabi Muhammad mengatakan, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis.””

14) Tidak boleh berpura-pura menawarkan dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.

15) Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar membeli kepadanya.

Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar bisnisnya sendiri menjadi ramai dan banyak pembelinya. Hal ini merupakan tindakan yang dilarang dan merugikan orang lain.

16) Tidak boleh melakukan Ihtikar

Ihtikar merupakan tindakan menumpuk dan menyimpan barang dalam waktu tertentu dengan tujuan menjualnya lagi dengan menaikkan harga ketika ketersediaan barang tersebut menjadi langka dipasar. Nabi Muhammad ﷺ melarang keras tindakan ini.

17) Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah ﷻ.

Dalam melakukan kegiatan bisnis tidak boleh melalaikan dan menunda untuk beribadah kepada Allah ﷻ. Dan dalam menjalankan kegiatan bisnis ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melalaikan beribadah kepada Allah ﷻ.

18) Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi bahaya atau tidak boleh menjual barang yang dilarang.

Tindakan seperti ini dapat merugikan orang lain bahkan masyarakat luas. Para pelaku bisnis tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat luas seperti menjual senjata, dll. Namun, diperbolehkan dengan tujuan yang baik dan memiliki ijin negara yang jelas. Selain itu para pelaku bisnis juga dilarang untuk menjual barang-barang yang haram seperti miras, obat terlarang atau makanan yang mengandung babi, atau kandungan yang tidak halal lainnya. Para pelaku bisnis harus menjual barang yang halal dan suci.

19) Memberi tenggang waktu apabila penghutang belum mampu membayar.

Dalam Islam diajarkan untuk memberikan tambahan waktu jika ada orang yang benar-benar kesulitan dalam membayar hutang atau bahkan boleh membebaskannya.

Etika bisnis Islam memiliki landasan normatif yang sudah pasti landasannya adalah Al-Qur'an, Hadis dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Menurut Muslich (2004) landasan normatif etika bisnis Islam setidaknya ada 4 elemen dasar dalam sistem etika yaitu:

1) Landasan Tauhid

Landasan ini digunakan sebagai pondasi utama bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupannya termasuk dalam bermuamalah. Landasan tauhid ini mengajarkan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah ﷻ sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu berawal dan berakhir hanya kepada Allah ﷻ (Baedowi, 2011). Firman Allah ﷻ dalam Q.S Al-An'am ayat 162 dapat mengkonotasikan landasan tauhid ini yang artinya "Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam". Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah ﷻ sesungguhnya untuk beribadah kepada Allah ﷻ. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dimuka bumi ini ditunjukkan benar-benar hanya untuk Allah ﷻ. Manusia dalam menjalankan fungsi kehidupannya, dalam berkreasi, dalam mengembangkan potensinya termasuk dalam melakukan segala kegiatannya seperti bermuamalah, dll. itu semua akan dipertanggung jawabkan kepada Allah ﷻ.

2) Landasan Keseimbangan (Keadilan)

Landasan keseimbangan ini mengajarkan bagaimana dalam menyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah ﷻ harus seimbang dan serasi. Termasuk manusia yang diciptakan oleh Allah ﷻ memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata Allah ﷻ tidak ada perbedaan dan tidak ada yang diistimewakan. Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 menjelaskan bahwa orang yang adil akan lebih dekat dengan ketakwaan. Dari Q.S. Al-Maidah ayat 8 menjelaskan semakin adil

seseorang maka semakin dekat orang tersebut dengan ketawaan kepada Allah ﷻ. Landasan ini juga mengajarkan bagaimana dalam beraktivitas di dunia bisnis, yang mana ajaran Islam mengharuskan setiap pelaku bisnis berbuat adil dalam hal apapun baik yang disukai maupun yang tidak disukainya. Dalam landasan ini juga dapat dipahami oleh setiap pelaku bisnis bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat itu sangat penting. Jadi dalam bisnis tidak cukup jika hanya mengejar dunia saja dan itu menyebabkan tidak seimbang. Oleh karenanya landasan ini mengajarkan para pelaku bisnis tidak hanya mencari kesejahteraan duniawi tetapi juga keselamatan akhirat.

3) Landasan Kehendak Bebas

Islam sangat memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya. Allah ﷻ sudah memberikan sumber-sumber yang akan manusia pilih untuk dikembangkan seperti akal, emosi, nalar, dll. Disisi lain manusia diberi kebebasan untuk mengatur, dan memilih mau digunakan ke hal yang baik atau buruk potensi dan sumber daya yang sudah diberikan oleh Allah tersebut. Namun, dengan diberikannya kebebasan kepada manusia untuk memilih itu pastinya diikuti dengan konsekuensi yang akan didapat dan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Jika konsekuensi baik akibat penggunaan sumber daya maka akan mendapatkan manfaat yang baik juga baik bagi dirinya maupun dari orang sekitarnya dan hal sebaliknya terjadi jika konsekuensinya buruk. Ini sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam Q.S. An-Nisa ayat 85. Hal ini juga berlaku pada bisnis. Jika pelaku bisnis ingin menggunakan sumber daya yang ada di bumi

ini dengan baik dan ingin memberikan manfaat untuk orang banyak maka akan mendapatkan pahala dari Allah ﷻ. Hal yang sebaliknya terjadi jika pelaku bisnis menggunakan sumber daya untuk hal yang dilarang oleh Allah maka akan mendapatkan dosa dari Allah.

4) Landasan Pertanggungjawaban

Landasan ini berkaitan dengan landasan kebebasan. Karena segala kebebasan yang dilakukan manusia pasti ada pertanggungjawabannya, baik pertanggungjawaban kepada manusia lainnya, lingkungannya dan pastinya kepada Allah ﷻ. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ pada Q.S. Al-Mudassir ayat 38. Oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk menggunakan potensi sumber daya yang dimilikinya pasti memiliki batasan-batasan tertentu untuk menggunakannya, batasannya tersebut adalah yang diatur dalam Al-Quran, Hadis dan Sunnah Rasul. Aturan-aturan tersebut harus ditaati dan digunakan sebagai acuan dalam menggunakan potensi sumber daya tersebut. Pada akhirnya semua akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah ﷻ nantinya.

Kegiatan bisnis pun walaupun diberikan pilihan untuk menggunakan sumber daya sebebaskan-bebasnya, namun dalam etika bisnis Islam kegiatan bisnis harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ada di Al-Quran, Hadis dan Sunnah Rasul. Karena kembali lagi semua yang dilakukan manusia di bumi ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Oleh karena itu, sebagai pebisnis yang muslim harus menaati segala aturan yang sudah ditetapkan

dalam Al-Quran, Hadis dan Sunnah Rasul karena umat muslim tidak hanya akan mempertanggungjawabkan tindakannya didunia tetapi juga diakhirat.

2.1.11 Ethical Identity Index (EII)

Ethical Identity Index (EII) merupakan alat ukur yang digunakan oleh Haniffa dan Hudaib dalam penelitiannya. *Ethical Identity Index (EII)* ini digunakan untuk menilai tingkat perbedaan antara *communicated ethical identity* dengan *ideal ethical identity*. Haniffa dan Hudaib (2007) merancang instrumen penelitian ini sehingga secara umum mencakup lima komponen utama, yang mana lima komponen utama ini merumuskan lima fitur informasi pengungkapan perbankan syariah berdasarkan nilai-nilai etika islam sekaligus menjadi pembeda identitas antara bank syariah dan bank konvensional. Lima komponen tersebut yaitu filosofi dan nilai-nilai yang mendasari, ketetapan produk dan layanan yang bebas bunga, kesepakatan atas transaksi yang dapat diterima dan sesuai secara syariah, fokus atas pengembangan dan tujuan sosial, dan kewajiban untuk direview/diulas oleh Dewan Pengawas Syariah. Penjelasan dari kelima komponen utama adalah sebagai berikut:

1. Filosofi dan nilai-nilai yang mendasari

Bank syariah diberikan kepercayaan oleh masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola modal yang diberikan oleh para pemegang saham, maka dari itu bank syariah sendiri harus berusaha untuk mempertanggung jawabkan kepercayaan yang telah diberikan tersebut secara financial. Namun, bank syariah tidak hanya memiliki tanggung jawab secara finansial saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral kepada para pelaku

bisnis. Karena bank syariah juga memiliki fungsi untuk menjalankan tujuan sosial dan juga ada tuntutan untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam setiap kegiatannya sehingga semua kegiatan bisnis mereka harus didasari dengan dengan agama dan ajaran-ajaran Islam, dan tujuannya pun seharusnya tidak lagi *money oriented* namun lebih dari itu yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah ﷻ. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang beriman, shaleh, dan memiliki pengetahuan dan kompetensi dibidang yang terkait dengan perbankan dan pengetahuan syariah khususnya yang terkait dengan transaksi bisnis. Dalam komponen ini terdapat dua dimensi yaitu (1) Pernyataan visi dan misi dan (2) Dewan direksi dan pejabat perusahaan.

2. Ketetapan produk dan layanan yang bebas bunga

Bank syariah sendiri memiliki tuntutan untuk melaksanakan segala kegiatannya harus sesuai dengan ajaran syariah dan tidak boleh melanggarnya. Hal ini berdampak juga dengan segala produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh mengandung riba di dalamnya. Riba sendiri artinya tambahan, baik dalam jumlah banyak atau sedikit hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu agar dapat bersaing dengan bank konvensional, bank syariah harus melakukan inovasi dalam produk yang ditawarkan dan tidak boleh menyalahi aturan syariah. Namun, pada kenyataan dan pada konsisi tertentu, ada bank syariah yang cenderung memilih untuk meng"Islamkan" produk dan jasa dari sistem konvensional dibandingkan dengan mengembangkan dan mengaplikasikan ajaran Islam secara menyeluruh ke dalam produk dan jasanya. Dimensi yang terdapat pada komponen ini adalah produk dan layanan.

3. Kesepakatan atas transaksi yang dapat diterima dan sesuai secara syariah

Bank syariah lebih dari sekedar menawarkan produk dan jasa bebas bunga. Bank syariah juga memiliki keharusan untuk dapat membiayai proyek dan transaksi yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan menghindari pembiayaan atau investasi di aktivitas atau produk yang dianggap haram di dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang paham dan berkompeten mengenai pengetahuan tentang nilai-nilai Islam.

4. Fokus atas pengembangan dan tujuan sosial

Bank syariah memiliki tuntutan dan tanggung jawab lain selain harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya yaitu memiliki tuntutan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satu indikatornya adalah kontribusi bank syariah dalam mengelola zakat, infaq, shodaqoh dan qardhul hasan. Bank syariah juga harus dapat mensejahterakan karyawannya dan dapat memberikan fasilitas kepada karyawannya untuk dapat mengembangkan diri. Karena karyawan merupakan aset dan harta dari sebuah perusahaan. Selain itu, bank syariah juga dituntut untuk dapat bersikap baik dan memberikan perhatian khusus kepada debitur. Bank syariah pun diharapkan dapat berkontribusi juga dalam pengabdian masyarakat. Dimensi-dimensi yang terdapat dalam komponen ini adalah (1) Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan, (2) Dimensi

Komitmen Terhadap Karyawan, (3) Dimensi Komitmen Terhadap Debitur, (4) Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat.

5. Kewajiban untuk direview/diulas oleh Dewan Pengawas Syariah

Pada bank syariah pasti memiliki DPS yang memiliki peran memastikan bahwa semua aktivitas mulai dari penyusunan sampai pada pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ajaran Islam. DPS juga memiliki tugas lain yaitu meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. DPS juga harus membuat pernyataan dan laporan secara berkala tiap tahunnya untuk melaporkan bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Kemudian dari kelima komponen utama yang sudah dijelaskan tersebut dijabarkan kedalam tujuh dan 78 (tujuh puluh delapan) poin penilaian, adapun sebagai berikut yang disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Indikator *Ethical Identity Index (EII)*

A. Dimensi Pernyataan Visi dan Misi	
1.	Komitmen beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.
2.	Komitmen memberikan hasil sesuai prinsip syariah
3.	Fokus memaksimalkan keuntungan pemegang saham
4.	Melayani kebutuhan umat muslim sekarang
5.	Melayani kebutuhan umat muslim masa depan
6.	Komitmen terlibat hanya pada investasi yang diperbolehkan Islam
7.	Komitmen hanya pada kegiatan pendanaan yang diperbolehkan Islam
8.	Komitmen untuk mengetahui kewajiban sesuai pernyataan kontrak.
9.	Apresiasi terhadap pemegang saham dan pelanggan

Tabel 2.1. Lanjutan

B. Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak	
1.	Keberadaan nama anggota dewan komisaris.
2.	Posisi anggota dewan komisaris.
3.	Foto anggota dewan komisaris.
4.	Profil anggota dewan komisaris.
5.	Kepemilikan saham anggota dewan komisaris.
6.	Jabatan ganda diantara anggota dewan komisaris.
7.	Keanggotaan dewan komite audit.
8.	Komposisi dewan: eksekutif vs non-eksekutif.
9.	Peran ganda: CEO adalah ketua dewan komisaris.
10.	Nama-nama tim manajemen.
11.	Posisi-posisi tim manajemen
12.	Foto tim manajemen.
13.	Profil tim manajemen.
C. Dimensi Produk dan Layanan	
1.	Tidak ada keterlibatan dalam kegiatan tidak halal.
2.	Presentase laba dari keterlibatan tidak halal.
3.	Alasan keterlibatan dalam kegiatan tidak halal.
4.	Penanganan kegiatan tidak halal.
5.	Memperkenalkan produk baru.
6.	Persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebelum produk baru.
7.	Dasar konsep syariah atas produk baru.
8.	Daftar/definisi produk.
9.	Kegiatan investasi umum.
10.	Kegiatan pembiayaan umum.
D. Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan	
1.	Pertanggungjawaban zakat.
2.	Jumlah zakat yang dibayarkan.
3.	Sumber dana zakat.
4.	Penggunaan dana dan pemanfaatan zakat.
5.	Saldo zakat yang tidak didistribusikan.
6.	Alasan adanya saldo zakat yang tidak didistribusikan.
7.	Pengesahan sumber dan penggunaan dana zakat oleh DPS.
8.	Pengesahan oleh DPS bahwa zakat telah dihitung sesuai syariah.
9.	Jumlah zakat yang dibayarkan oleh individu.
10.	Sumber dana sedekah.
11.	Penggunaan dana sedekah.
12.	Sumber dana <i>qardh hasan</i> .
13.	Penggunaan dana <i>qardh hasan</i> .
14.	Kebijakan penyediaan dana <i>qardh hasan</i> .
15.	Kebijakan dana <i>qardh hasan</i> yang tidak kembali.

Tabel 2.1. Lanjutan

E. Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan	
1.	Penghargaan terhadap karyawan.
2.	Jumlah karyawan.
3.	Kebijakan kesempatan yang sama.
4.	Kesejahteraan karyawan.
5.	Pelatihan syariah.
6.	Pelatihan lain.
7.	Pelatihan pelajar/skema perekrutan.
8.	Pelatihan moneter/keuangan.
9.	Hadiah bagi karyawan.
F. Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	
1.	Kebijakan hutang.
2.	Jumlah hutang yang dihapuskan.
3.	Jenis kegiatan peminjaman umum.
4.	Jenis kegiatan peminjaman khusus.
G. Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat	
1.	Cabang khusus perempuan.
2.	Menciptakan lapangan kerja.
3.	Dukungan terhadap organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
4.	Partisipasi dalam kegiatan sosial pemerintahan.
5.	Mensponsori kegiatan masyarakat.
6.	Komitmen untuk peran sosial.
7.	Penyelenggaraan konferensi ekonomi Islam.
H. Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
1.	Jumlah anggota.
2.	Foto anggota
3.	Remunerasi anggota.
4.	Laporan ditandatangani oleh semua anggota.
5.	Jumlah rapat yang diadakan.
6.	Pemeriksaan seluruh transaksi (sebelum dan sesudah).
7.	Pengkajian sampel transaksi (sebelum dan sesudah).
8.	Laporan atas produk yang cacat (spesifik dan terperinci).
9.	Rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan atas produk yang cacat.
10.	Tindakan yang diambil manajemen atas produk yang cacat.
11.	Distribusi keuntungan dan kerugian sesuai prinsip syariah.

Sumber : (Haniffa dan Hudaib, 2007)

2.2 TELAAH PENELITIAN TERDAHULU

Berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis maka penulis melakukan beberapa kajian terdahulu dengan tujuan sebagai referensi, data pendukung dalam penelitian sekaligus memperkuat hasil analisis, adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul dan Peneliti	Teori, Metode	Variabel, Sampel, Alat (Ukur,Uji)	Hasil
Analisis Perbandingan Pengungkapan <i>Islamic Ethical Identity Index</i> Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia Hatta Setiabudhi, Bambang Agus Pramuka, Wita Ramadhanti, 2020	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Teori</u> <i>Sharia Enterprise Theory</i> • <u>Metode</u> Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Sampel</u> 14 Bank Umum Syariah (7 BUS di Indonesia dan 7 BUS di Malaysia) • <u>Alat</u> EII (<i>Ethical Identity Index</i>), Uji Normalitas, Uji <i>Independent T-test</i> 	Terdapat perbedaan pengungkapan <i>Islamic Ethical Identity</i> antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
Islamic Corporate Identity in the Practice of Annual Report Disclosure Islamic Bank Ratih Paramitasari, 2012	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Metode</u> Penelitian ini menggunakan metode cheklis berdasarkan pada lima tema dan delapan dimensi pada EII. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Sampel</u> Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Indonesia • <u>Alat</u> EII (<i>Ethical Identity Index</i>) 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengungkapan laporan tahunan bank umum syariah untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 telah mendekati standar pelaporan ideal yang mencerminkan Islamic Corporate Identity.

Tabel 2.2 Lanjutan

<p>Perbandingan Kinerja dan Pengungkapan Etika Etis Islam pada PT Bank Muamalat dengan PT Bank BRI Syariah. Lince Bulutoding, dan Muh. Ruslim Akbar, 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Teori</u> <i>Sharia Enterprise Theory</i> • <u>Metode</u> Penelitian pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Sampel</u> PT Bank Muamalat dan PT Bank BRI Syariah • <u>Alat</u> Untuk mengukur kinerja bank syariah menggunakan Metode SCnP dan untuk mengukur pengungkapan etika Islam menggunakan Ethical Identity Index 	<p>Hasil menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016, kinerja PT Bank Muamalat dan PT Bank BRI Syariah berpredikat memuaskan dan cukup sehat namun memiliki hasil yang berbeda. Sementara Perbandingan dan perkembangan pengungkapan etika Islam pada PT Bank Muamalat dan PT Bank BRI Syariah juga menunjukkan kondisi yang berbeda pada</p>
<p>Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah Afrida Putritama, 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Teori</u> <ul style="list-style-type: none"> - Teori Maslahat/ Maqasid al Syari'ah - Teori Eksistensi - Teori Kategori Hukum - Teori Kaidah Ushul dan I'adah al-Nadhar • <u>Metode</u> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 	<p>Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dengan objek penelitian industri perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, dan analisis menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah sehingga dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan (stakeholder) baik eksternal maupun internal dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut.</p>

Tabel 2.2 Lanjutan

<p>Analisis Pengungkapan Nilai Islam dalam Laporan Tahunan Bank Syariah di Indonesia Muhammad Praditya Mas'ud, 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Metode</u> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan eksplorasi 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Sampel</u> Sampel pada penelitian ini adalah sepuluh Laporan Tahun 2010 BUS dari sebelas BUS yang tersedia pada akhir tahun 2010. • <u>Alat</u> Peneliti menggunakan metode analisis konten yaitu metode untuk menganalisis isi kumpulan teks. 	<p>Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan kesepuluh bank umum syariah tersebut terhadap regulasi yang mengatur praktik pengungkapan pada laporan tahunan sudah baik dan memenuhi nilai-nilai Islam yang semestinya dilaporkan.</p>
<p>Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. Roszaini Haniffa dan Mohammad Hudaib, 2007</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Metode</u> Pada penelitian ini menggunakan analisis konten 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Sampel</u> 7 bank syariah di empat negara yang laporannya dari tahun 2002-2004 tersedia versi inggris di internet. • <u>Alat</u> EII (<i>Ethical Identity Index</i>) 	<p>Hasil pada penelitian yang dilakukan selama 3 tahun menunjukkan rata-rata EII seluruh bank syariah hanya terdapat satu dari tujuh bank syariah yang hasil EII nya berada diatas rata-rata. Enam bank syariah lainnya mengalami perbedaan antara pengungkapan etika yang dikomunikasikan dengan identitas etika Islam yang ideal.</p>

Tabel 2.2 Lanjutan

<p>Corporate Ethical Identity Perbankan Syariah di Indonesia Budi Sukardi dan Taufiq Wijaya, 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Metode</u> Penelitian ini merupakan survey eksplorasi dengan melihat informasi pengungkapan laporan tahunan bank syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Sampel</u> 11 Bank Umum Syariah Nasional. • <u>Alat</u> Pada penelitian ini menggunakan EII untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. 	<p>Indeks corporate ethical identity BUS di Indonesia, BSM (94%), BMI 90,7%, BRI Syariah (89,2%), BNI Syariah (88,3%), BCA Syariah (87,8%), Bank Jabar Banten Syariah (86,8%), Bank Syariah Bukopin (86%), Bank Syariah Mega Indonesia (80,4%), Bank Maybank Syariah Indonesia (80,1%), Bank Panin Syariah (79,1%), dan Bank Victoria Syariah (73,8%).</p>
<p>Islamic Values in the Annual Reports of the Shariah Bank to Create a Sharia Value-Added Rediyanto Putra, Rahma Rina Wijayanti, 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Teori</u> <i>Sharia Enterprise Theory</i> • <u>Metode</u> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode interpretif. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Sampel</u> Bank Muamalat • <u>Alat</u> Menggunakan metode analisis semiotik dan dalam penelitian ini menggunakan analisis semiotik diferensial. 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan tahunan Bank Muamalat dari 2012 hingga 2016 menerapkan nilai Islami. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan operasional bisnis Islam dijalankan sesuai dengan ajaran Islam dan percaya bahwa Tuhan adalah pemangku kepentingan utama. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam ini dengan baik diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah syariah yang bermanfaat dan bermakna bagi bank muamalat.</p>

2.3 PREPOSISI PENELITIAN

Preposisi 1 : Visi Misi pada BUS dan UUS tidak menunjukkan perbedaan

Visi dan misi merupakan hal yang penting dalam perusahaan yang mana dapat dikatakan sebagai ruh dari sebuah perusahaan. Hal ini karena visi dan misi menggambarkan tujuan dan cita-cita perusahaan yang akan dicapai, yang mana setiap karyawan yang ada di perusahaan harus memahami dan berusaha untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Visi adalah suatu pernyataan ringkas yang berisikan arahan dan apa yang diinginkan perusahaan dimasa depan. Visi ini harus dapat memberikan motivasi dan aspirasi kepada seluruh karyawan dan dapat dijadikan panduan dalam menyusun strategi perusahaan (Lesduwiyana dan Widyawati, 2018). Menurut Hariwibowo (2018) visi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan organisasi untuk menjamin kesuksesan dan kelestarian organisasi dalam jangka panjang.

Misi sendiri memiliki arti pernyataan tentang fungsi organisasi dan sasaran yang akan dicapai (Lesduwiyana dan Widyawati, 2018). Misi ini digunakan sebagai petunjuk arah dalam dunia bisnis. Tujuan dari misi adalah untuk menyampaikan kepada stakeholder didalam maupun diluar organisasi mengenai latar belakang berdirinya perusahaan, arah dan tujuan perusahaan (Hariwibowo, 2018). Dalam perbankan Islam menetapkan visi dan misi perusahaan harus mengandung nilai-nilai Islam dan ajaran Islam di dalamnya. Tujuan akhir dari semua ajaran Islam adalah menjadi berkah untuk semua umat manusia (Chapra, 2008). Tujuan dari ajaran Islam ini pun juga harus masuk dalam penetapan visi dan misi dalam perbankan syariah, selain itu juga harus benar-benar

memperhatikan segala aspek, tidak boleh condong pada hal-hal tertentu, dan nilai-nilai syariah harus benar-benar masuk dalam visi dan misi. Karena dasar aktivitas dari perbankan syariah akan berdasarkan pada visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh perbankan syariah. Secara umum, jika dilihat pada kelembagaan syariah yaitu pada BUS dan UUS pada visi misinya tidak menunjukkan perbedaan. Hal ini dikarenakan BUS dan UUS memiliki dasar dan pedoman yang sama yaitu Al-Quran dan Hadis sehingga dalam menerapkan tujuan dan berkomitmen pada perbankan sama yaitu untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah ﷻ.

Preposisi 2 : Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS

Menurut *The Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) (Syukron, 2015). Peran *Good Corporate Governance* ini sangat penting dalam mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan usaha, karena jika bisnis yang dijalankan memiliki *governance* yang baik maka bisnis tersebut akan cenderung lebih bertahan dan berlangsung dengan baik. Dalam bank syariah pun juga dituntut untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dan pelaksanaannya pun harus memenuhi prinsip syariah yang sudah diatur dalam undang-undangan Perbankan syariah, yaitu kegiatan usaha tidak mengandung riba, maysir, gharah, haram dan zalim (Abubakar dan Handayani,

2018). Tata kelola perusahaan antara bank syariah dan bank konvensional tentu berbeda, karena tujuan akhir yang ingin diwujudkan dari bank syariah adalah *maqasid* syariah. Selain itu, bank syariah memiliki fungsi sosial yang tidak dimiliki dalam perbankan konvensional, dari hal ini dapat dilihat bahwa bank syariah dari sisi tujuan, prinsip syariah mencirikan karakteristik yang lebih mengedepankan kesejahteraan umat dan terciptanya pertumbuhan berkelanjutan. Oleh karena itu, bank sistem governance pada bank syariah lebih kompleks dari bank konvensional karena harus memperhatikan regulasi umum dan mematuhi prinsip syariah juga (Abubakar dan Handayani, 2018).

Jika dibandingkan dalam penerapan identitas etika Islam pada tata kelola perusahaannya maka secara umum dewan komisaris dan manajemen puncak pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS. Hal ini karena terdapat perbedaan pada BUS dan UUS terletak pada bentuk badan usahanya, dimana BUS setingkat dengan bank konvensional, sedangkan UUS berada tepat satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional di dalam bank umum konvensional yang bersangkutan (Kustanti dan Indriani, 2016). Selain itu, karena BUS memiliki tuntutan yang lebih besar dalam menerapkan identitas etika Islam pada tata kelola perusahaannya, sehingga menyebabkan tata kelola pada UUS belum sepenuhnya menerapkan identitas etika Islam di dalamnya, membuat UUS tidak lebih baik dibandingkan dengan BUS.

Preposisi 3 : Produk dan Layanan yang sesuai dengan syariah pada Bank Umum Syariah lebih diterapkan dibandingkan pada Unit Usaha Syariah

Produk dan layanan pada perbankan syariah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran syariah, dan tidak boleh ada praktik transaksi yang diharamkan. Hal tersebut juga menjadi keunggulan tersendiri sekaligus menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam Islam diajarkan hendaknya dalam menawarkan produk kepada pembeli harus sesuai dengan apa yang digambarkan. Kemudian pengertian layanan Menurut Kotler dan Amstrong (2004), pelayanan adalah berbagai kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud, dan tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan. Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya dalam memberikan pelayanan hendaklah memberikan pelayanan yang baik terutama pada lembaga keuangan hendaklah memberikan layanan dengan sopan dan ramah (Nuraini, 2014).

Perbankan syariah dalam mengeluarkan produk dan layanannya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang mendasar adalah praktik dalam menjalankan operasional bisnisnya, dimana perbankan syariah berbasis pada prinsip syariah. Jika dibandingkan antara BUS dan UUS secara umum dapat dikatakan BUS dalam mengungkapkan produk dan layanan lebih sesuai dengan ajaran Islam dan identitas etika Islam dibandingkan UUS. Hal ini disebabkan BUS dalam hal produk dan pelayanannya lebih lengkap dibandingkan dengan UUS. Selain itu, UUS posisinya masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan

konvensional, yang masih menerapkan riba dalam produk dan pelayanannya. Akibatnya, dalam membuat kebijakan dan mengeluarkan produk dan layanan baru unit usaha syariah tidak se fleksible bank umum syariah.

Preposisi 4 : BUS dalam menjalankan zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan lebih baik dibandingkan dengan UUS

Pembayaran zakat bagi umat muslim ini adalah hal yang sangat penting, karena zakat merupakan salah satu bentuk ibadah wajib umat muslim kepada Allah ﷻ yang mana jika dilihat secara spiritual merupakan proses penyucian diri dari si pemilik harta. Artinya dengan membayar zakat, sama saja pemilik harta membersihkan diri dari sifat tamak dan kikir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supriyaningsih (2020) menyatakan secara keseluruhan pembayaran zakat bank syariah di Indonesia masih belum memuaskan. Padahal seharusnya bank syariah merupakan institusi syariah yang harusnya menekankan pembayaran zakat, dimana zakat sendiri merupakan perwujudan kesempurnaan Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Karena perbankan syariah sudah berkomitmen untuk menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam oleh karena itu sebuah keharusan bagi perbankan syariah untuk dapat membayar zakat dan menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan.

Hal ini pun juga berlaku bagi kelembagaan pada perbankan syariah, yaitu diantaranya pada BUS dan UUS. Jika dibandingkan dalam menjalankan zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan antara BUS dan UUS secara umum BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS. Hal ini disebabkan, BUS ini lebih *independent* dibandingkan dengan UUS yang mana masih di bawah bank umum konvensional,

sehingga dalam beberapa aktivitasnya UUS masih tergantung dengan aturan, dan kebijakan pada bank konvensional yang menaunginya. Sedangkan pada bank konvensional sendiri zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan ini bukan merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan. Inilah salah satu penyebab kenapa BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS.

Preposisi 5 : UUS memiliki komitmen terhadap karyawan yang lebih baik dibandingkan dengan BUS

Karyawan atau Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena apapun rencana dan tujuan dari perusahaan tanpa adanya kinerja dari manusia maka tidak akan berhasil. Oleh karena itu, perlakuan perusahaan kepada karyawannya juga sangat penting. Seorang karyawan akan lebih meningkatkan kinerja jika kepuasan kerjanya terpenuhi dan kesejahteraannya terjamin, dan hal sebaliknya pun juga dapat terjadi (Ritawati, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Wikaningrum (2011) ini pun juga menunjukkan hasil bahwa sebagian praktek dan kebijakan pengelolaan SDM pada perbankan syariah dalam penelitian ini sudah optimal, dan sebagian yang lain belum. Ini menunjukkan bahwa belum semua perbankan syariah maksimal dalam berkomitmen pada karyawan.

Jika dilihat pada kelembagaan bank syariah diantaranya pada BUS dan UUS dalam berkomitmen pada karyawan, secara umum dapat diketahui bahwa UUS memiliki komitmen terhadap karyawan yang lebih baik dibandingkan dengan BUS. Hal ini disebabkan UUS dalam berbagai aktivitas UUS selalu di bawah bank umum konvensional. Dimana bank umum konvensional merupakan

bank yang sudah ada lebih lama dibandingkan bank syariah sehingga sudah jauh lebih banyak melewati berbagai hal, menghadapi pesaing baik dari sisi pelayanan, variasi produk, dll. Dengan banyaknya hal yang sudah dilewati membuat bank umum konvensional pasti akan meningkatkan berbagai hal yang akan mendukung kualitas dari bank tersebut salah satunya meningkatkan kualitas karyawannya. Selain itu, menurut Sardar dan Nafik (2016) mengatakan pada hasil penelitiannya bahwa secara financial kesejahteraan karyawan pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah. Hal-hal yang dilakukan bank umum konvensional ini akan berdampak pada UUS juga, oleh karena itulah UUS lebih berkomitmen terhadap karyawan dibandingkan dengan BUS.

Preposisi 6 : UUS berkomitmen terhadap debitur lebih baik dibandingkan dengan BUS.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya pada penyaluran kredit, mempunyai peranan penting dalam pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan. Pada bank syariah ini berbeda dengan bank konvensional yang mana seluruh pembiayaan di dasarkan pada bunga, sedangkan pada bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, isthisna, dan qardh (Afif dan Mawardi, 2014). Pada preposisi ini mengatakan bahwa dalam UUS berkomitmen terhadap debitur lebih baik dibandingkan dengan BUS. Pendapat ini didukung oleh Nugroho, Kuncoro, Mastur (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara BUS dengan UUS. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan tetapi jika dilihat nilai rata-ratanya BUS lebih unggul dibandingkan dengan UUS. Aspek kualitas pembiayaan

BUS berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan Nugroho, Kuncoro, Mastur (2019) tidak terdapat perbedaan yang signifikan, tetapi jika dilihat dari kualitas aset BUS dan UUS. Kualitas aset pada UUS lebih baik dibandingkan UUS.

Preposisi 7 : BUS lebih menjalankan komitmen terhadap masyarakat dengan baik dibandingkan dengan UUS

Komitmen terhadap masyarakat ini bisa dikatakan sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada (Panggabean dan Tandiontong, 2017). Dalam perbankan syariah melakukan kegiatan sosial merupakan suatu hal yang wajib dan harus dilakukan karena dalam menjalankan bisnisnya bukan sekedar mencari keuntungan tetapi juga harus menciptakan *maslahah*.

Tanggungjawab perbankan syariah pada masyarakat pun sudah melekat secara *inhern* sebagai konsekuensi kesadaran bank syariah pada ajaran Islam, sehingga ekspektasi stakeholder pada perbankan syariah tentu berbeda dengan bank konvensional. Ini disebabkan karena kesadaran bahwa bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan dari ekonomi Islam tidak hanya fokus pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan saja tetapi juga harus memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Akibatnya, implementasi tanggungjawab sosial pada perbankan syariah tidak hanya untuk disalurkan pada dana sosial saja, tetapi juga dapat diarahkan kepada pemerataan

pemilikan saham. Jadi stakeholder tidak hanya merasa ikut memiliki perusahaan tetapi benar-benar ikut memiliki perusahaan (Syukron, 2015).

Jika dibandingkan penerapan tanggung jawab masyarakat dalam kelembagaan perbankan syariah antara BUS dan UUS, maka BUS lebih menjalankan komitmen terhadap masyarakat dengan baik dibandingkan dengan UUS. Menurut pendapat Aldi Antapani dalam Afifatuz (2012) yang menyatakan bahwa bank umum syariah adalah bank yang menerapkan sistem *independent* pada sistem perbankan syariahnya, secara keseluruhan sistem perbankannya sudah murni berbasis syariah. Ini menunjukkan bahwa BUS memiliki tuntutan lebih dibandingkan UUS yang mana sistemnya tidak *independent* dan masih di bawah bank umum konvensional. Akibatnya, BUS harus menjalankan komitmen-komitmen kepada masyarakat tersebut dengan lebih baik lagi agar tuntutan fungsi sosial yang harus dijalankan BUS dapat dijalankan secara maksimal.

Preposisi 8 : Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS

DPS memiliki tugas melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi, dan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah sudah mematuhi prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI. DPS ini yang menjadi pembeda antara perbankan syariah dan konvensional, ini juga menjadi keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Menurut Mulazid (2016) peran DPS belum optimal sehingga hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dan pengembangan produk. Belum optimalnya ini dapat

disebabkan karena anggota DPS merangkap menjadi anggota DPS di lembaga keuangan yang lain, atau memiliki pekerjaan lain baik sebagai dosen atau yang lainnya. Jika peran DPS belum maksimal maka, dicoba dilihat peran DPS dari kelembagaan perbankan syariah diantaranya terdapat BUS dan UUS secara umum dapat diketahui bahwa DPS pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS. Ini karena pada BUS memiliki tuntutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan UUS. Yang mana pada BUS memiliki peraturan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPS di BUS lebih banyak dibandingkan pada UUS. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS yang mengatur beberapa peraturan yaitu:

“Hal-hal yang diatur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPS pada bank umum syariah adalah:

- 1) Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti rekomendasi DPS.
- 2) Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi DPS.
- 3) Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah disampaikan kepada DPS.
- 4) Dalam rangka antara lain meningkatkan kualitas proses pengawasan oleh DPS, BUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Hal-hal yang diatur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPS pada unit usaha syariah adalah:

- 1) Direktur UUS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.
- 2) Direkrut UUS wajib menyediakan data dan informasi terkait pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS.
- 3) UUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan data/informasi bagi DPS.”

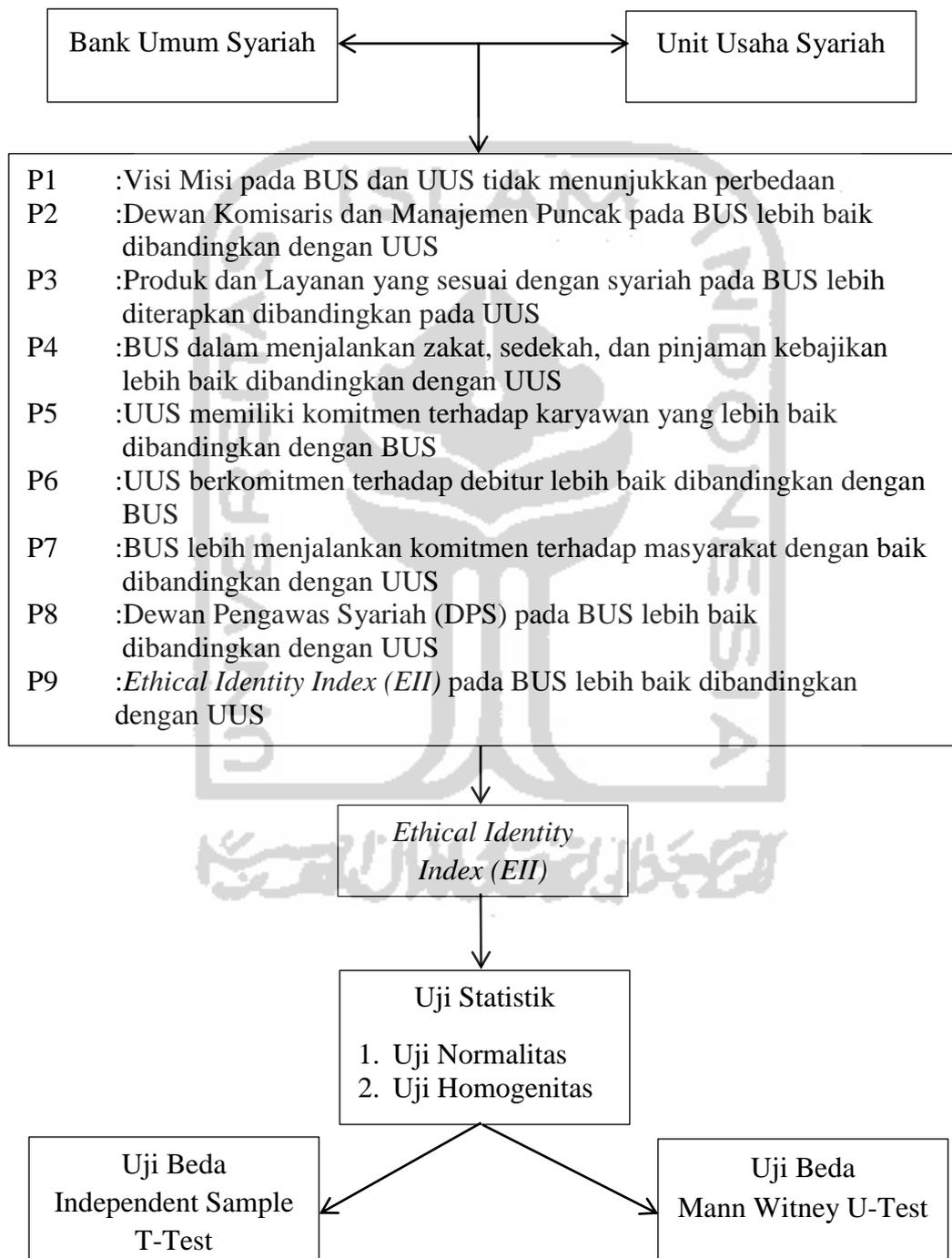
Oleh karena pada bank umum syariah memiliki tuntutan yang lebih banyak dan memang harus dipenuhi oleh DPS, maka DPS pada BUS dituntut lebih baik dibandingkan DPS pada UUS.

Preposisi 9 : Ethical Identity Index (EII) pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS

Ethical Identity Index (EII) pada BUS lebih baik dibandingkan pada UUS. Penerapan identitas etika Islam pada perbankan syariah secara umum sudah baik, hal ini diungkapkan oleh Setiabudhi, Pramuka, Ramadhanti (2020) dalam hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa pengungkapan *Islamic Ethical Identity Index* bank syariah di Indonesia adalah sebesar 70% yang mana hasil ini sudah menunjukkan hasil yang baik. Jika dibandingkan antara BUS dan UUS dalam penerapan identitas etika Islam maka BUS lebih baik dibandingkan UUS hal ini disebabkan karena BUS lebih lama beroperasi dibandingkan UUS, yang mana menurut Owusu-Ansah (1998) dan Akhtaruddin (2005) (dalam Mas'ud (2011)) bahwa kualitas informasi pengungkapan secara umum dipengaruhi oleh umur perusahaan, semakin lama berdiri, semakin baik kualitas pengungkapannya. Selain itu, karena BUS disini memiliki tuntutan lebih besar dibandingkan dengan UUS, banyak masyarakat yang menaruh harapan lebih kepada BUS dalam menerapkan identitas etika Islam, ini dikarenakan BUS sudah berdiri sendiri, berbeda dengan UUS yang masih bernaung pada bank induknya yaitu bank konvensional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramitasari (2012) menunjukkan bahwa BUS telah mendekati standar pelaporan yang ideal yang mencerminkan *Islamic Corporate Identity* atau dapat dikatakan bahwa pengungkapan *Islamic Corporate Identity* sudah baik. Hal serupa juga diungkapkan oleh diungkapkan oleh Mas'ud (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan kesepuluh bank umum syariah terhadap

regulasi yang mengatur praktik pengungkapan pada laporan tahunan sudah baik dan memenuhi nilai-nilai Islam yang semestinya dilaporkan.

2.4 MODEL PENELITIAN



Gambar 2.1 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI PENELITIAN

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh BUS dan UUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Total seluruh BUS dan UUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjumlah 37, yang mana terdapat 14 BUS dan 23 UUS.

Kemudian, untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang di dasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan kriteria berikut:

1. BUS dan UUS yang terdaftar di OJK dari tahun 2014-2018.
2. BUS dan UUS memiliki *website* resmi yang aktif atau dapat diakses dan tidak sedang dalam perbaikan.
3. BUS dan UUS yang memiliki Laporan tahunan lebih dari 5 tahun.

Berdasarkan penentuan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* didapatkan sampel yang memenuhi kriteria di atas untuk BUS terpilih 12 sampel dan UUS terpilih 16 sampel. Adapun nama BUS dan UUS terdapat pada lampiran penelitian.

3.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan tahunan (*annual report*) BUS dan UUS. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan memperoleh data dan informasi mengenai perkembangan bank melalui website setiap bank terkait. Selain itu data juga diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan.

3.3 TEKNIK ANALISIS DATA

3.3.1 Ethical Identity Index (EII)

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan *Ethical Identity Index (EI)*. Indikator dan instrumen pengumpulan data dilakukan dengan checklist. Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan dikotomis dimana jika item tersebut dimasukkan dalam laporan tahunan maka diberi nilai 1 (satu) sedangkan jika tidak dikomunikasikan maka diberikan nilai 0 (nol) (Putra dan Farahmita, 2013). Setelah poin penilaian setiap item terkumpul dan untuk mendapatkan hasil maka dijumlahkan dan dihitung menggunakan formula:

$$EII_j = \frac{\sum_{t=1}^{n_j} X_{ij}}{n_j}$$

EII_j = *Ethical Identity Index* (EII)

N_j = Jumlah konstruk atau item n yang diungkapkan oleh perusahaan j

X_{ij} = 1 jika pada tahun ke i konstruk atau item diungkapkan, 0 jika pada tahun ke i konstruk atau item tidak diungkapkan

Peringkat pada bank syariah diberikan berdasarkan hasil dari *Ethical Identity Index* (EII). Semakin tinggi EII maka semakin sedikit variasi antara *communicated ethical identity* dengan *ideal ethical identity*. Dengan kata lain jika EII nya tinggi maka menunjukkan bahwa perbankan syariah tersebut telah menerapkan identitas etika Islam dengan baik. Sebaliknya juga jika EII rendah maka menunjukkan bahwa perbankan syariah tersebut masih harus meningkatkan dan menerapkan dengan lebih baik lagi identitas etika Islam dalam setiap aktivitasnya. Setelah *Ethical Identity Index* (EII) dari data BUS dan UUS dihasilkan, akan dilakukan uji normalitas, uji homogenitas dan yang terakhir dengan uji beda.

3.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur data yang didapatkan terdistribusi normal atau tidak, sehingga pemilihan statistik dapat dilakukan dengan tepat (Riyanto, Slamet dan Andhita, 2020). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Uji *Kolmogorov Smirnov* yang merupakan salah satu prasyarat untuk melakukan uji beda. Menurut Sugiyono, (2010 dalam Riyanto, Slamet dan Andhita, 2020) kelebihan pada Uji *Kolmogorov Smirnov* adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi diantara satu pengamat

dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Uji *Kolmogorov Smirnov* ini biasanya digunakan untuk menguji data dalam jumlah yang sedikit atau kurang dari 30 data. Pengujian Uji *Kolmogorov Smirnov* akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS, untuk melihat normal atau tidaknya data menggunakan kriteria pengujian:

Jika Signifikan $> 0,05$ maka data terdistribusi normal.

Jika Signifikan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

3.3.3 Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan salah satu pengujian yang menjadi prasyarat sebelum melakukan uji beda. Pengujian homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari dua kelompok data apakah saling homogen atau tidak saling homogen. Pada penelitian ini menggunakan Uji Levene (*Levene's Test*). Uji Levene ini memiliki kriteria pengujian yaitu:

Jika Signifikan $> \text{Alpha } (0,05)$ maka 2 kelompok data memiliki varian yang sama atau saling homogen.

Jika Signifikan $< \text{Alpha } (0,05)$ maka 2 kelompok data tidak memiliki varian yang sama atau tidak saling homogen.

3.3.4 Uji Beda

Uji beda merupakan pengujian yang dilakukan setelah uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dan uji homogenitas harus dilakukan dan jika hasilnya menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan saling homogen maka menggunakan uji parametrik dan pada penelitian ini menggunakan pengujian

Independent Sample T-Test. Pada Uji Independent Sample T-Test ini memiliki kriteria:

- Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$

Maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

- Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$

Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Dan apabila hasil dari uji normalitas dan uji homogenitas yang sudah dilakukan dan menunjukkan data terdistribusi tidak normal atau tidak saling homogen atau keduanya, maka akan dilakukan Uji Beda Non-Parametrik dengan menggunakan Mann Witney U-Test. Dasar pengambilan keputusan untuk Mann Witney U-Test adalah

- Jika $Asymp.Sig.(2\text{ tailed}) < \alpha (0,05)$

maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

- Jika $Asymp.Sig.(2\text{ tailed}) > \alpha (0,05)$

maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 ETHICAL IDENTITY INDEX BUS DAN UUS

Pengumpulan data sudah dilakukan dengan menggunakan metode checklist, yang mana jika item dimasukkan dalam laporan tahunan maka diberi nilai 1 (satu) sedangkan jika tidak dikomunikasikan maka diberikan nilai 0 (nol). Setelah poin penilaian setiap item terkumpul lalu dilakukan perhitungan untuk menapatkan hasil dengan menjumlahkan setiap item dan menghitung menggunakan formula EII. Hasilnya pun menunjukkan jika semakin tinggi EII maka semakin sedikit variasi antara *communicated ethical identity* dengan *ideal ethical identity* atau jika EII nya tinggi maka menunjukkan bahwa perbankan syariah tersebut telah menerapkan identitas etika Islam dengan baik dan sebaliknya. Hingga akhirnya didapatkan data seperti pada Tabel 4.1 yang merupakan rekap dari masing-masing bank pada BUS dan UUS rata-rata selama lima tahun dari tahun 2014-2018.

Tabel 4.1

Hasil Rata-rata Selama 5 Tahun Pengungkapan EII pada BUS dan UUS

	Ethical Identity Index	BUS	UUS
A	Dimensi Pernyataan Visi dan Misi	42%	36%
B	Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak	84%	88%
C	Dimensi Produk dan Layanan	46%	51%
D	Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan	54%	17%
E	Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan	60%	75%
F	Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	62%	74%
G	Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat	54%	66%
H	Dimesi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	43%	41%
I	Ethical Identity Index (EII)	57%	53%

Tabel 4.1 menunjukkan hasil dari rata-rata presentase skor *Ethical Identity Index* (EII) selama lima tahun yaitu dari tahun 2014-2018 pada BUS dan UUS. Dari tabel ini dapat diketahui perbedaan dari BUS dan UUS baik per dimensi maupun secara total EII selama lima tahun. Pertama pada dimensi pernyataan visi dan misi, BUS mendapatkan hasil 42% yang mana ini lebih tinggi 6% dibandingkan dengan presentase yang didapatkan UUS yang mendapatkan 36%. Hal ini mengartikan bahwa BUS yang telah menerapkan identitas etika Islam dengan baik pada dimensi visi dan misi. Kedua pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak yang mana antara BUS dan UUS terdapat selisih perbedaan 4%, dimana UUS mendapatkan presentase yang lebih tinggi yaitu sebesar 88% dibandingkan dengan BUS yang mendapatkan 84%. Hal ini mengartikan bahwa UUS yang telah menerapkan identitas etika Islam dengan baik pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak.

Selanjutnya yang ketiga adalah dimensi produk dan layanan, pada dimensi ini UUS mendapatkan presentase yang lebih tinggi 6% dibandingkan dengan BUS, dimana UUS mendapatkan presentase sebesar 51% sedangkan pada BUS mendapatkan 46%. Pada dimensi produk dan layanan ini UUS yang telah menerapkan identitas etika Islam dengan baik. Keempat adalah dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan, pada dimensi ini BUS yang telah menerapkan identitas etika Islam dengan baik dibandingkan dengan UUS. Karena pada dimensi ini menunjukkan perbedaan yang sangat menonjol dibandingkan dengan dimensi lainnya karena selisih presentase pada BUS dan UUS pada dimensi ini adalah yang paling tinggi yaitu sebesar 37% yang mana BUS lebih tinggi

dibandingkan dengan UUS. BUS mendapatkan 54% dan UUS hanya mendapatkan 17%. Kemudian yang kelima adalah dimensi komitmen terhadap karyawan, pada dimensi ini terdapat selisih perbedaan presentase sebesar 16% dimana BUS mendapatkan presentase yang lebih rendah yaitu sebesar 60% dibandingkan dengan UUS yang mendapatkan 75%. Hal ini mengartikan bahwa UUS yang telah menerapkan identitas etika Islam dengan baik pada dimensi komitmen terhadap karyawan. Keenam adalah dimensi komitmen terhadap debitur, pada dimensi ini BUS mendapatkan presentase sebesar 62% dan UUS mendapatkan presentase sebesar 74% maka pada dimensi ini UUS yang lebih menerapkan identitas etika Islam dengan baik dibandingkan dengan BUS dan antara BUS dan UUS pada terdapat selisih sebesar 12%.

Ketujuh adalah dimensi komitmen terhadap masyarakat, pada dimensi ini terdapat perbedaan presentase BUS dan UUS sebesar 12% dimana BUS lebih rendah dibandingkan dengan UUS. BUS pada dimensi ini mendapatkan presentase sebesar 54% dan UUS mendapatkan presentase 66%, maka hal ini menunjukkan bahwa UUS yang telah menerapkan identitas etika Islam dengan baik. Selanjutnya, kedelapan adalah dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada dimensi ini memiliki selisih yang paling rendah dibandingkan dengan dimensi yang lain yaitu sebesar 2%. BUS mendapatkan presentase lebih tinggi dibandingkan dengan UUS yaitu sebesar 43% sedangkan UUS mendapatkan 41%. Hal ini mengartikan bahwa BUS yang telah menerapkan identitas etika Islam dengan baik pada dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Terakhir adalah *Ethical Identity Index* (EII), EII ini merupakan hasil rata-rata dari delapan dimensi

dan pada EII ini terdapat perbedaan selisih antara BUS dan UUS yaitu sebesar 4%, hasil pada EII ini menunjukkan bahwa BUS lebih baik dalam menerapkan identitas etika Islam dibandingkan dengan UUS karena BUS mendapatkan hasil yang lebih tinggi yaitu sebesar 57% dan UUS mendapatkan hasil sebesar 53%.

4.2 HASIL UJI NORMALITAS BUS DAN UUS

Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan Uji *Kolmogorov Smirnov* yang merupakan salah satu prasyarat untuk melakukan uji beda. Pada uji *Kolmogorov Smirnov* untuk melihat normal atau tidaknya data menggunakan kriteria pengujian:

Jika Signifikan $> 0,05$ maka data terdistribusi normal.

Jika Signifikan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 4.2.
Hasil Rekap Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

	Ethical Identity Index	Uji Normalitas		Hasil	
		BUS	UUS	BUS	UUS
A	Dimensi Pernyataan Visi dan Misi	0,200	0,066	Normal	Normal
B	Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak	0,079	0,102	Normal	Normal
C	Dimensi Produk dan Layanan	0,200	0,016	Normal	Tidak Normal
D	Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan	0,000	0,025	Tidak Normal	Tidak Normal
E	Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan	0,200	0,089	Normal	Normal
F	Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	0,026	0,000	Tidak Normal	Tidak Normal
G	Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat	0,200	0,006	Normal	Tidak Normal
H	Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	0,200	0,016	Normal	Tidak Normal
I	Ethical Identity Index (EII)	0,200	0,200	Normal	Normal

Tabel 4.2 di atas yang menunjukkan hasil rekap dari uji normal dengan uji *kolmogorov smirnov* yang sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Uji *kolmogorov smirnov* ini dilakukan pada setiap dimensi EII.

a) Dimensi Pernyataan Visi dan Misi

Hasil pada dimensi visi dan misi pada BUS menunjukkan signifikansi sebesar 0,200. Maka $\text{Sig. (0,200)} > \text{Alpha (0,05)}$ hasilnya adalah data terdistribusi normal. Selanjutnya, dimensi visi dan misi pada UUS hasilnya menunjukkan signifikansi 0,066. Maka $\text{Sig. (0,066)} > \text{Alpha (0,05)}$ hasilnya data terdistribusi normal. Jadi pada dimensi visi dan misi pada BUS dan UUS keduanya memiliki data yang terdistribusi normal.

b) Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak

Hasil pengujian uji *kolmogorov smirnov* pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak pada BUS menunjukkan signifikansi sebesar 0,079. Maka, $\text{Sig. (0,079)} > \text{Alpha (0,05)}$ hasilnya data terdistribusi normal. Kemudian, dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak pada UUS signifikansi sebesar 0,102. Maka $\text{Sig. (0,102)} > \text{Alpha (0,05)}$ hasilnya data terdistribusi normal. Jadi pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak pada BUS dan UUS keduanya memiliki data yang terdistribusi normal.

c) Dimensi Produk dan Layanan

Hasil pada dimensi produk dan layanan pada BUS menunjukkan signifikansi sebesar 0,200. Maka, $\text{Sig. (0,200)} > \text{Alpha (0,05)}$ hasilnya data terdistribusi normal. Selanjutnya, dimensi produk dan layanan pada UUS signifikansi sebesar 0,016. Maka, $\text{Sig. (0,016)} < \text{Alpha (0,05)}$ hasilnya data tidak

terdistribusi normal. Jadi pada dimensi produk dan layanan pada BUS memiliki data yang terdistribusi normal dan UUS memiliki data yang tidak terdistribusi normal.

d) Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan

Hasil pengujian uji *kolmogorov smirnov* pada dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan pada BUS menunjukkan signifikansi yaitu 0,000. Maka, $\text{Sig. (0,000)} < \text{Alpha (0,05)}$ sehingga hasilnya data tidak terdistribusi normal. Kemudian, pada dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan pada UUS signifikansi yaitu 0,025. Maka, $\text{Sig. (0,025)} < \text{Alpha (0,05)}$ sehingga hasilnya data tidak terdistribusi normal. Jadi, pada dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan pada BUS dan UUS memiliki data yang data tidak terdistribusi normal.

e) Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan

Hasil pada dimensi komitmen terhadap karyawan pada BUS menunjukkan signifikansi sebesar 0,200. Maka, $\text{Sig. (0,200)} > \text{Alpha (0,05)}$ hasilnya data terdistribusi normal. Selanjutnya, dimensi komitmen terhadap karyawan pada UUS signifikansi sebesar 0,016. Maka, $\text{Sig. (0,089)} > \text{Alpha (0,05)}$ hasilnya data terdistribusi normal. Jadi pada dimensi komitmen terhadap karyawan pada BUS dan UUS keduanya memiliki data yang terdistribusi normal.

f) Dimensi Komitmen Terhadap Debitur

Hasil pengujian uji *kolmogorov smirnov* pada dimensi komitmen terhadap debitur pada BUS. BUS menunjukkan signifikansi yaitu 0,026. Maka, $\text{Sig. (0,026)} < \text{Alpha (0,05)}$ sehingga hasilnya data tidak terdistribusi normal.

Kemudian, pada dimensi komitmen terhadap debitur pada UUS, signifikansi yaitu 0,000. Maka, $\text{Sig. (0,000)} < \text{Alpha (0,05)}$ sehingga hasilnya data tidak terdistribusi normal. Jadi, pada dimensi komitmen terhadap debitur pada BUS dan UUS keduanya memiliki data yang tidak terdistribusi normal.

g) Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat

Hasil pada dimensi komitmen terhadap masyarakat pada BUS menunjukkan signifikansi sebesar 0,200. Maka, $\text{Sig. (0,200)} > \text{Alpha (0,05)}$ hasilnya data terdistribusi normal. Selanjutnya, dimensi komitmen terhadap masyarakat pada UUS signifikansi sebesar 0,006. Maka, $\text{Sig. (0,006)} < \text{Alpha (0,05)}$ hasilnya data tidak terdistribusi normal. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa pada dimensi komitmen terhadap masyarakat pada BUS memiliki data yang data terdistribusi normal dan UUS memiliki data yang tidak terdistribusi normal.

h) Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hasil pengujian uji *kolmogorov smirnov* pada dimesi dewan pengawas syariah (DPS) pada BUS. BUS menunjukkan signifikansi yaitu 0,200. Maka, $\text{Sig. (0,200)} > \text{Alpha (0,05)}$ sehingga hasilnya data terdistribusi normal. Kemudian, pada dimesi dewan pengawas syariah (DPS) pada UUS, signifikansi yaitu 0,016. Maka, $\text{Sig. (0,016)} < \text{Alpha (0,05)}$ sehingga hasilnya data tidak terdistribusi normal. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa pada dimesi dewan pengawas syariah (DPS) pada BUS memiliki data yang data terdistribusi normal dan UUS memiliki data yang tidak terdistribusi normal.

i) Ethical Identity Index (EII)

Hasil pada *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS menunjukkan signifikansi sebesar 0,200. Maka, Sig. (0,200) > Alpha (0,05) hasilnya data terdistribusi normal. Selanjutnya, *Ethical Identity Index* (EII) pada UUS menunjukkan signifikansi sebesar 0,200. Maka, Sig. (0,200) > Alpha (0,05) hasilnya data terdistribusi normal. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa pada *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS memiliki data yang terdistribusi normal.

4.3 HASIL UJI HOMOGENITAS BUS DAN UUS

Selanjutnya setelah dilakukan uji normalitas maka dilakukan uji homogenitas yang mana uji homogenitas ini juga menjadi pengujian prasyarat sebelum melakukan uji beda. Jenis uji homogenitas yang dilakukan adalah Uji Levene (*Levene's Test*). Uji Levene ini memiliki kriteria pengujian yaitu:

Jika Signifikan > Alpha (0,05) maka 2 kelompok data memiliki varian yang sama atau saling homogen.

Jika Signifikan < Alpha (0,05) maka 2 kelompok data tidak memiliki varian yang sama atau tidak saling homogen.

Tabel 4.3
Hasil Uji Homogenitas Levene's Test

	Ethical Identity Index	Uji Homogenitas	Hasil
A	Dimensi Pernyataan Visi dan Misi	0,130	Homogen
B	Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak	0,013	Tidak Homogen
C	Dimensi Produk dan Layanan	0,407	Homogen
D	Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan	0,430	Homogen
E	Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan	0,985	Homogen
F	Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	0,000	Tidak Homogen
G	Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat	0,040	Tidak Homogen
H	Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	0,782	Homogen
I	Ethical Identity Index (EII)	0,029	Tidak Homogen

Tabel 4.3 di atas merupakan rekap dari hasil uji homogenitas *Levene's Test* dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil dari tabel di atas maka di bawah ini merupakan penjelasan didapatkannya hasil pada tabel di atas.

a) Dimensi Pernyataan Visi dan Misi

Pada dimensi visi dan misi pada BUS dan UUS jika dilihat dari tabel di atas menunjukkan hasil saling homogen. Hal ini karena signifikansinya sebesar 0,130. Jadi, Sig. (0,130) > Alpha (0,05) maka hasilnya data saling homogen.

b) Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak

Pada dimensi ini, jika dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa data pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak pada BUS dan UUS tidak

saling homogen. Hal ini karena signifikansinya sebesar 0,013. Maka, Sig (0,013) < Alpha (0,05) sehingga hasilnya data tidak saling homogen.

c) Dimensi Produk dan Layanan

Pada dimensi produk dan layanan pada BUS dan UUS jika dilihat dari tabel di atas menunjukkan hasil saling homogen. Hal ini karena signifikansinya sebesar 0,407. Jadi, Sig. (0,407) > Alpha (0,05) maka hasilnya data saling homogen.

d) Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan

Pada dimensi ini, jika dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa data pada dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan pada BUS dan UUS saling homogen. Hal ini karena Sig. (0,430) > Alpha (0,05) sehingga hasilnya data saling homogen.

e) Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan

Pada dimensi komitmen terhadap karyawan pada BUS dan UUS jika dilihat dari tabel di atas menunjukkan hasil saling homogen. Hal ini karena signifikansinya sebesar 0,985. Jadi, Sig. (0,985) > Alpha (0,05) maka hasilnya data saling homogen.

f) Dimensi Komitmen Terhadap Debitur

Pada dimensi ini, jika dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa data pada dimensi komitmen terhadap debitur pada BUS dan UUS tidak saling homogen. Hal ini karena Sig. (0,000) < Alpha (0,05) sehingga hasilnya data tidak saling homogen.

g) Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat

Pada Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat pada BUS dan UUS jika dilihat dari tabel di atas menunjukkan hasil tidak saling homogen. Hal ini karena Sig. (0,040) < Alpha (0,05) maka hasilnya data tidak saling homogen.

h) Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pada dimensi ini, jika dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa data pada dimensi dewan pengawas syariah (DPS) pada BUS dan UUS saling homogen. Hal ini karena Sig. (0,782) > Alpha (0,05) sehingga hasilnya data saling homogen.

i) *Ethical Identity Index* (EII)

Pada *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS jika dilihat dari tabel di atas menunjukkan hasil tidak saling homogen. Hal ini karena Sig. (0,029) < Alpha (0,05) maka hasilnya data tidak saling homogen.

4.4 HASIL UJI BEDA BUS DAN UUS

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya melakukan uji beda. Uji beda yang dilakukan pada penelitian ini untuk mendapatkan hasil secara statistik ada tidaknya perbedaan yang terdapat pada BUS dan UUS baik per dimensi EII maupun ada tidaknya perbedaan pada EII nya. Sebelum melakukan uji beda harus menentukan dahulu uji beda mana yang tepat untuk digunakan, jika uji normalitas dan uji homogenitas hasilnya menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan saling homogen maka menggunakan uji parametrik dan pada penelitian ini menggunakan pengujian

Independent Sample T-Test. Pada Uji Independent Sample T-Test ini memiliki kriteria:

- Jika t hitung $>$ t tabel

Maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

- Jika t hitung $<$ t tabel

Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Dan apabila hasil dari uji normalitas dan uji menunjukkan data terdistribusi tidak normal atau tidak saling homogen atau keduanya, maka akan dilakukan Uji Beda Non-Parametrik dengan menggunakan Mann Witney U-Test.

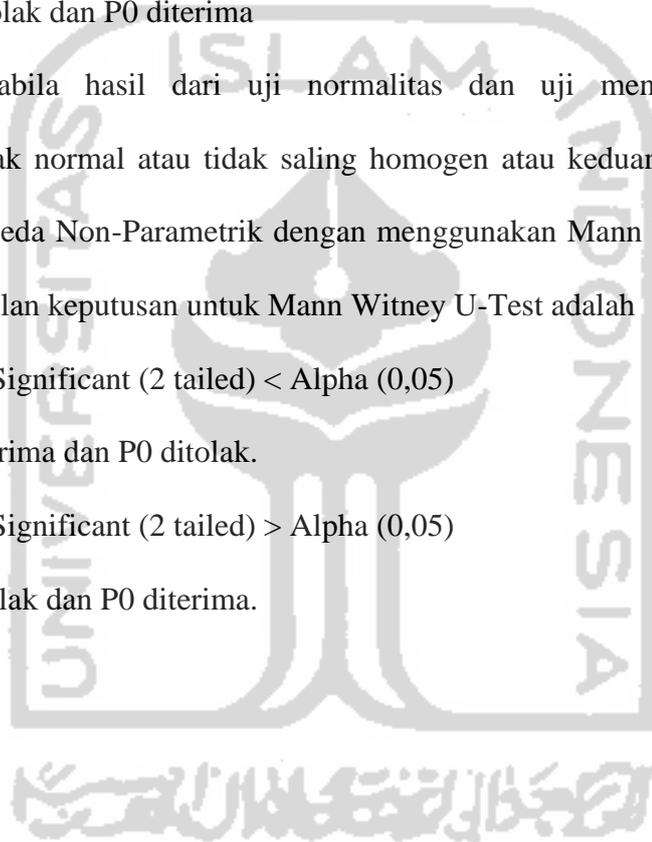
Dasar pengambilan keputusan untuk Mann Witney U-Test adalah

- Jika Asymp. Significant (2 tailed) $<$ Alpha (0,05)

maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

- Jika Asymp. Significant (2 tailed) $>$ Alpha (0,05)

maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.



Tabel 4.4

Rekap Hasil Uji Normalitas dan Uji Homogenitas
dan Jenis Uji Beda yang Digunakan

No	Dimensi	Uji Normalitas		Uji Homogenitas	Jenis Uji Beda
		BUS	UUS		
A	Dimensi Pernyataan Visi dan Misi	Normal	Nomal	Homogen	Parametrik Independent T-Test
B	Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak	Normal	Nomal	Tidak Homogen	Non Parametrik Uji Mann-Whitney
C	Dimensi Produk dan Layanan	Normal	Tidak Nomal	Homogen	Non Parametrik Uji Mann-Whitney
D	Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan	Tidak Nomal	Tidak Nomal	Homogen	Non Parametrik Uji Mann-Whitney
E	Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan	Normal	Normal	Homogen	Parametrik Independent T-Test
F	Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	Tidak Nomal	Tidak Nomal	Tidak Homogen	Non Parametrik Uji Mann-Whitney
G	Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat	Normal	Tidak Nomal	Tidak Homogen	Non Parametrik Uji Mann-Whitney
H	Dimesi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Normal	Tidak Nomal	Homogen	Non Parametrik Uji Mann-Whitney
I	<i>Ethical Indentity Index</i> (EII)	Normal	Normal	Tidak Homogen	Non Parametrik Uji Mann-Whitney

Tabel 4.4 di atas merupakan tabel yang merekap hasil dari uji normalitas dan uji homogenitas yang sudah dilakukan. Dari hasil yang sudah didapatkan tersebut kemudian hasil tersebut dijadikan dasar untuk menentukan jenis uji beda yang akan dilakukan. Dan hasil uji beda yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Rekap Hasil Uji Beda Parametrik Independent T-Test

Dimensi	Jenis Uji Beda	Nilai t	df	t-tabel	Hasil
Dimensi Pernyataan Visi dan Misi	Parametrik Independent T-Test	1,488	26	1,7056	(1,488) < (1,7056) P0 gagal ditolak
Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan	Parametrik Independent T-Test	2,662	26	1,7056	(2,662) > (1,7056) P0 ditolak

Tabel 4.6.

Rekap Hasil Uji Beda Non Parametrik Uji Mann-Whitney

Dimensi	Jenis Uji Beda	Asymp Sig (2-tailed)	Alpha	Hasil
Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak	Non Parametrik Uji Mann-Whitney	0,133	0,05	(0,133) > (0,05) P0 gagal ditolak
Dimensi Produk dan Layanan	Non Parametrik Uji Mann-Whitney	0,142	0,05	(0,142) > (0,05) P0 gagal ditolak
Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan	Non Parametrik Uji Mann-Whitney	0,000	0,05	(0,000) < (0,05) P0 ditolak
Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	Non Parametrik Uji Mann-Whitney	0,039	0,05	(0,039) < (0,05) P0 ditolak
Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat	Non Parametrik Uji Mann-Whitney	0,048	0,05	(0,048) < (0,05) P0 ditolak
Dimesi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Non Parametrik Uji Mann-Whitney	0,590	0,05	(0,590) > (0,05) P0 gagal ditolak
<i>Ethical Indentity Index (EII)</i>	Non Parametrik Uji Mann-Whitney	0,471	0,05	(0,471) > (0,05) P0 gagal ditolak

a) Dimensi Pernyataan Visi dan Misi

Uji beda yang dilakukan pada dimensi pernyataan visi dan misi dilakukan untuk mengetahui terdapat perbedaan atau tidak di dimensi pernyataan visi dan misi pada BUS dan UUS. Uji beda ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dimana sebelum melakukan uji beda terlebih dahulu menentukan preposisi yang akan digunakan, yaitu

P0 : Tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan visi dan misi pada BUS dan UUS.

P1 : Terdapat perbedaan dalam pengungkapan visi dan misi pada BUS dan UUS.

Setelah menentukan preposisi yang akan digunakan, selanjutnya adalah melakukan uji beda. Berdasarkan pada tabel 4.4 pada dimensi pernyataan visi dan misi ini menggunakan uji beda Independent t-test. Hasil pengujiannya pun dapat dilihat pada tabel 4.5

Berdasarkan dari hasil pengujian pada tabel 4.5 di atas didapatkan hasil bahwa nilai $t = 1,488$ dan $df = 26$, pada uji beda independent t-test ini menggunakan t-tabel dimana diketahui bahwa $t\text{-tabel} = 1,7056$. Nilai t-tabel ini berasal pada tabel t untuk mendapatkan nilai t-tabel ini menggunakan *df* (*degree of freedom*) dan tingkat konfidensinya. Sehingga, pada dimensi pernyataan visi dan misi ini didapatkan hasil t hitung ($1,488$) < t -tabel ($1,7056$), dapat disimpulkan P0 gagal ditolak. Jadi tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan visi dan misi pada BUS dan UUS secara signifikan.

b) Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak

Uji beda pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak ini dilakukan untuk mendapatkan hasil secara statistik apakah terdapat perbedaan atau tidak pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak ini. Sebelum melakukan pengujian, terlebih dahulu menentukan preposisi yang akan digunakan yaitu

P0 : Tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak pada BUS dan UUS.

P1 : Terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak pada BUS dan UUS.

Pada dimensi ini dilakukan pengujian non parametrik dengan uji *mann whitney*. Dari hasil pengujian pada tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa nilai dari Asymp Sig (2-tailed) menunjukkan sebesar 0,133 dimana angka ini lebih besar dari Alpha (0,05), maka dalam dimensi ini dapat disimpulkan bahwa P0 gagal ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak pada BUS dan UUS secara signifikan.

c) Dimensi Produk dan Layanan

Sebelum melakukan pengujian uji beda pada dimensi produk dan layanan ini terlebih dahulu menentukan preposisi yang akan digunakan yaitu

P0 : Tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi produk dan layanan pada BUS dan UUS.

P1 : Terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi produk dan layanan pada BUS dan UUS.

Uji beda yang dilakukan pada dimensi produk dan layanan menggunakan pengujian non parametrik dengan *Uji mann whitney*. Hasilnya pun dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas menunjukkan hasil bahwa Asymp.Sig Nilai dari Asymp Sig (2-tailed) menunjukkan sebesar 0,142 dimana angka ini lebih besar dari Alpha (0,05), sehingga P0 gagal ditolak dan dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi produk dan layanan pada BUS dan UUS secara signifikan.

d) Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan

Pada dimensi ini dilakukan uji beda dengan menggunakan uji beda *mann whitney* dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak pada pengungkapan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan pada BUS dan UUS secara statistik. Preposisi pada pengujian uji beda ini adalah sebagai berikut

P0 : Tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan pada BUS dan UUS.

P1 : Terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan pada BUS dan UUS.

Hasil pada pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 yang menunjukkan hasil Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,000. Sehingga didapatkan hasil P_0 ditolak yang artinya terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan pada BUS dan UUS secara signifikan. Ini dikarenakan Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

e) Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan

Pada dimensi ini dilakukan pengujian parametrik dengan uji beda *independent t-test*. Sebelum dilakukan pengujian terlebih dahulu menentukan preposisi yang akan digunakan yaitu

P_0 : Tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi komitmen terhadap karyawan BUS dan UUS.

P_1 : Terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi komitmen terhadap karyawan pada BUS dan UUS.

Dari hasil pengujian pada tabel 4.5 di atas didapatkan hasil yaitu nilai t sebesar 2,662, df 26, dan diketahui t tabel adalah sebesar 1,7056. Sehingga, didapatkan bahwa t hitung sebesar 2,662 lebih besar dari t -tabel sebesar 1,7056. Maka, P_0 ditolak, dapat disimpulkan terdapat perbedaan dalam pengungkapan Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan pada BUS dan UUS secara signifikan.

f) Dimensi Komitmen Terhadap Debitur

Uji beda yang dilakukan pada dimensi komitmen terhadap debitur ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak antara BUS dan UUS

dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi komitmen terhadap debitur. Sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu menentukan preposisi yang akan digunakan

P0 : Tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi komitmen terhadap debitur pada BUS dan UUS.

P1 : Terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi komitmen terhadap debitur pada BUS dan UUS.

Pada dimensi ini dilakukan pengujian non parametrik dengan uji *mann whitney*. Dari hasil pengujian pada tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,039. Jadi didapatkan hasil Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan P0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi komitmen terhadap debitur pada BUS dan UUS secara signifikan.

g) Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat

Pada dimensi komitmen terhadap masyarakat ini uji beda yang dilakukan menggunakan uji beda non parametrik dengan uji *mann whitney*. Sebelum melakukan pengujian preposisi terlebih menentukan preposisi yang akan digunakan yaitu

P0 : Tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi komitmen terhadap masyarakat pada BUS dan UUS.

P1 : Terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi komitmen terhadap masyarakat pada BUS dan UUS.

Dari tabel 4.6 di atas dapat diketahui hasil pengujian uji beda dan didapatkan hasil bahwa Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,048 lebih kecil dari pada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa P0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi komitmen terhadap masyarakat pada BUS dan UUS secara signifikan.

h) Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pada dimensi ini dilakukan pengujian non parametrik dengan uji *mann whitney*. Dalam pengujian ini juga dibentuk preposisi sebelum melakukan pengujian, yang mana preposisinya adalah sebagai berikut

P0 : Tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BUS dan UUS.

P1 : Terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BUS dan UUS.

Dari hasil pengujian tabel 4.6 di atas didapatkan hasil bahwa Asymp.Sig (2-tailed) adalah sebesar 0,590, dimana hasil Asymp.Sig (2-tailed) 0,590 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa P0 gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BUS dan UUS secara signifikan.

i) *Ethical Identity Index* (EII)

Uji beda yang dilakukan pada *Ethical Identity Index* (EII) ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak antara BUS dan UUS dalam mengungkapkan *Ethical Identity Index* (EII). Sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu menentukan preposisi yang akan digunakan

P0 : Tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS.

P1 : Terdapat perbedaan dalam pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS.

Dari hasil pengujian pada tabel 4.6 di atas didapatkan hasil bahwa Asymp.Sig (2-tailed) adalah sebesar 0,471. Dimana hasil Asymp.Sig (2-tailed) 0,471 lebih besar 0,05 Jadi dapat disimpulkan bahwa P0 gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS secara signifikan.

4.5 PEMBAHASAN

a) Dimensi Pernyataan Visi dan Misi

Pada dimensi pernyataan visi dan misi ini berdasarkan perhitungan dan pengujian yang sudah dilakukan dapat diketahui hasil perhitungan uji beda P0 gagal ditolak. Jadi tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan visi dan misi pada BUS dan UUS secara signifikan. Jika dilihat pada perhitungan rata-rata EII selama lima tahun pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata presentase

dimensi visi dan misi pada BUS mendapatkan presentase 42% dan UUS 36% terdapat selisih yang tidak terlalu jauh yaitu sebesar 6%. Dari hasil ini dapat diartikan tetap ada sedikit perbedaan dalam menerapkan identitas etika Islam dalam visi dan misi pada BUS dan UUS, BUS pada dimensi pernyataan visi dan misi ini sedikit lebih unggul dibandingkan dengan UUS, tetapi perbedaan ini tidak terlalu berpengaruh sehingga pada dimensi pernyataan visi dan misi ini dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan. Kemudian, dilihat dari hasil presentase yang didapatkan BUS dan UUS belum begitu maksimal dalam menerapkan identitas etika Islam pada visi dan misinya karena angka presentase dari dimensi pernyataan visi dan misi ini masih di bawah 50%. Jika dilihat lagi pada laporan tahunan tiap bank baik pada BUS dan UUS dalam mengungkapkan visi dan misinya masih belum maksimal dalam menjelaskan aktivitasnya mengelola aset apakah sudah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau belum. Rata-rata bank-bank pada BUS dan UUS belum maksimal dalam mengungkapkannya. Tetapi, secara garis besar BUS dan UUS sudah sama-sama menerapkan identitas etika Islam dengan cukup baik, namun dalam mengungkapkannya belum maksimal. Hasil ini mendukung preposisi 1 pada penelitian ini yang mengatakan bahwa visi misi pada BUS dan UUS tidak menunjukkan perbedaan.

b) Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak

Berdasarkan perhitungan dan pengujian di atas pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak dapat disimpulkan bahwa H₀ gagal ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak pada BUS dan UUS secara signifikan. Jika

dilihat dari hasil perhitungan rata-rata EII selama lima tahun pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata presentase pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak ini sudah baik karena menunjukkan hasil presentase yang cukup tinggi yaitu 84% untuk BUS dan 88% untuk UUS. UUS disini lebih unggul 4% dibandingkan dengan BUS walaupun selisih ini tidak banyak namun menunjukkan bahwa UUS sedikit lebih unggul, namun secara garis besar perbedaan ini tidak terlalu berpengaruh sehingga pada dimensi ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan. BUS dan UUS sudah sama-sama baik dalam menerapkan identitas etika Islam pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak, rata-rata bank-bank pada BUS dan UUS sudah mengungkapkan setiap poin penilaian pada dimensi ini dalam laporan tahunannya.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak pada BUS dan UUS tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan sudah menunjukkan hasil yang sama-sama baik dalam menerapkan identitas etika Islam dan sudah maksimal. Hasil ini tidak mendukung preposisi 2 dalam penelitian ini yang mengatakan dewan komisaris dan manajemen puncak pada bank umum syariah lebih baik dibandingkan dengan unit usaha syariah.

c) Dimensi Produk dan Layanan

Perhitungan dan pengujian di atas menunjukkan hasil P0 gagal ditolak dan dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi produk dan layanan pada BUS dan UUS secara signifikan. Namun, jika dilihat dari hasil presentase rata-rata selama 5 tahun pada BUS dan UUS menunjukkan bahwa

UUS lebih unggul 6% dibandingkan dengan BUS. UUS mendapatkan 51% sedangkan BUS 46%, tetapi perbedaan ini tidak terlalu berpengaruh dan secara garis besar BUS dan UUS tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dari presentase yang didapatkan BUS dan UUS ini menunjukkan bahwa dalam pengungkapan dimensi produk dan layanan dalam laporan tahunan sudah cukup baik namun kurang maksimal, hal ini disebabkan salah satunya karena rata-rata pada bank-bank BUS dan UUS memiliki kekurangan dalam mengungkapkan pendapatan non halal dan penjelasan mengenai konsep syariah pada produk baru, tetapi secara keseluruhan poin penilaian lainnya sudah diungkapkan dengan baik. Selain itu, hasil ini cukup mengejutkan karena jika dilihat secara umum BUS lebih baik dari segi produk dan layanan dibandingkan dengan UUS. Namun hasil ini menunjukkan UUS lebih baik dari pada BUS walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh. Ini disebabkan karena poin penilaian yang diungkapkan oleh UUS totalnya lebih banyak yang diungkapkan oleh UUS. Jika dilihat dari sebab lainnya ini bisa terjadi karena pelaporan UUS masih gabung bersama dengan bank konvensional yang menaunginya sehingga secara penataan dan pengungkapan dalam laporan tahunan lebih baik dan ini bisa dikatakan menjadi salah satu faktor UUS lebih baik dari pada BUS.

Dapat disimpulkan dari hasil pengujian ini bahwa pada dimensi produk dan layanan menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BUS dan UUS dan dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi ini belum maksimal namun sama-sama sudah cukup baik. Hasil ini menunjukkan tidak mendukung preposisi 3 dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa produk dan

layanan yang sesuai dengan syariah pada BUS lebih diterapkan dibandingkan pada UUS.

d) Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian di atas dapat diketahui bahwa hasil P0 ditolak yang artinya terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan pada BUS dan UUS secara signifikan. Dari Tabel 4.1, diketahui bahwa perbedaan presentase rata-rata antara BUS dan UUS sebesar 37%, ini merupakan perbedaan yang paling tinggi dibandingkan dengan dimensi yang lainnya. BUS mendapatkan presentase sebesar 54% dan UUS mendapatkan 17%. Pengungkapan identitas etika Islam di dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan pada BUS ini jauh lebih baik dibandingkan dengan UUS.

UUS dalam mengungkapkan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan tidak lebih baik dibandingkan BUS karena dalam mengungkapkan poin-poin penilaian rata-rata bank pada UUS banyak yang belum mengungkapkannya dengan baik, bahkan dari keseluruhan bank pada UUS belum ada setengahnya yang mengungkapkan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan ini dengan maksimal. Rata-rata bank-bank pada UUS ini tidak mengungkapkan rincian dari penggunaan dana zakat seperti alasan terdapatnya saldo zakat yang tidak didistribusikan, pengesahan sumber penggunaan dana zakat oleh DPS, pengesahan oleh DPS bahwa zakat telah dihitung sesuai syariah dan jumlah zakat yang dibayarkan oleh individu. Sedangkan pada bank-bank BUS hampir seluruh

poin penilaian pada dimensi ini sudah diungkapkan dan beberapa poin penilaian sudah diungkapkan dengan maksimal dan hampir seluruh bank-bank pada BUS mengungkapkannya. Selain itu, BUS lebih baik dalam mengungkapkan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan karena BUS lebih *independent* dibandingkan dengan UUS yang nota bene nya masih berada di bawah naungan bank konvensional. Sehingga BUS lebih mudah dan fleksible dalam menjalankan kegiatannya. BUS sendiri juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan UUS karena lebih *independent*, oleh karena itu, BUS selalu membuat laporan pertanggungjawaban untuk menyalurkan dana zakat dan sedekah ini dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, sedangkan pada UUS laporan ini rata-rata tidak dibuat walaupun terdapat beberapa bank pada UUS yang membuat tabel tetapi itu hanya beberapa saja, pelaporan penggunaan dan penyaluran dana zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan rata-rata hanya berupa penjelasan, tetapi ada beberapa bank pada UUS juga menggunakan tabel untuk mengungkapkannya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan pada dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan ini terdapat perbedaan yang signifikan dan dalam mengungkapkan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan ini, dan BUS jauh lebih baik dibandingkan UUS, walaupun BUS dalam mengungkapkannya termasuk yang belum maksimal karena angka persentasenya berada di angka 54%, tetapi BUS dalam mengungkapkan sudah termasuk cukup baik. Sedangkan UUS sangat belum maksimal dalam mengungkapkan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan karena angka persentasenya berada pada 17%, yang mana

mengartikan juga bahwa dalam laporan tahunan pada UUS belum mencerminkan identitas etika Islam dengan baik. Hasil ini mendukung preposisi 4 pada penelitian ini yang mengatakan BUS dalam menjalankan zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan lebih baik dibandingkan dengan UUS.

e) Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan

Dari hasil perhitungan dan pengujian di atas dapat diketahui P0 ditolak, dapat disimpulkan terdapat perbedaan dalam pengungkapan Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan pada BUS dan UUS secara signifikan. Berdasarkan Tabel 4.1 hasil perhitungan EII rata-rata selama 5 tahun didapatkan hasil presentase selisih antara BUS dan UUS yaitu sebesar 16%. BUS mendapatkan presentase 60% ini lebih rendah dibandingkan dengan UUS yang mendapatkan presentase 75%. Dari hasil ini dapat terlihat perbedaan BUS dan UUS dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi komitmen terhadap karyawan. Dilihat dari presentase yang didapatkan BUS dan UUS sama-sama sudah termasuk baik dalam mengungkapkan dimensi komitmen terhadap karyawan karena presentase yang didapatkan lebih dari 50%, artinya BUS dan UUS sudah maksimal dalam mengungkapkan dimensi ini.

Poin-poin penilaian dalam dimensi komitmen terhadap karyawan pada BUS dan UUS semuanya sudah diungkapkan, hanya saja nilai yang diungkapkan oleh UUS lebih banyak dibandingkan dengan yang diungkapkan oleh BUS. Sebab lain yang membuat UUS lebih unggul dibandingkan BUS adalah karena UUS masih berada dalam naungan bank konvensional yang mana banyak aktivitas

perusahaan yang diatur oleh bank konvensional yang menaunginya, dimana bank konvensional ini jauh lebih dahulu berdiri dibandingkan dengan bank umum syariah, sehingga, bank konvensional lebih banyak memiliki pengalaman dalam mengelola bisnisnya, termasuk dalam mengelola SDM. Hal ini berdampak pada UUS dalam mengelola SDM nya yang banyak dibantu oleh bank konvensional seperti dalam pengadaan pelatihan-pelatihan, kesejahteraan karyawan, penghargaan terhadap karyawannya, dll. yang mana memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dari bank umum syariah.

Hasil pengujian pada dimensi ini pun dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi komitmen terhadap karyawan pada BUS dan UUS. BUS dan UUS dalam mengungkapkan dimensi ini termasuk sudah baik dan maksimal, tetapi UUS lebih baik dalam mengungkapkan dimensi ini dibandingkan dengan BUS. Hasil ini mendukung preposisi 5 pada penelitian ini yang menyatakan UUS memiliki komitmen terhadap karyawan yang lebih baik dibandingkan dengan BUS.

f) Dimensi Komitmen Terhadap Debitur

Berdasarkan hasil uji beda yang sudah dilakukan dapat diketahui H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi komitmen terhadap debitur pada BUS dan UUS secara signifikan. Perbedaan pada BUS dan UUS ini jika dilihat dari tabel 4.1 diketahui terdapat selisih sebesar 12% antara BUS dan UUS. BUS mendapatkan 62% dan UUS mendapatkan 74%, presentase pada BUS dan UUS ini menunjukkan bahwa BUS

dan UUS sama-sama sudah baik dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi ini, karena keduanya mendapatkan presentase yang lebih dari 50%. Dari presentase tersebut pun dapat diketahui UUS lebih baik dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi komitmen terhadap debitur. Keunggulan dari UUS dibandingkan BUS ini disebabkan karena sebagian besar dari bank pada UUS mengungkapkan poin penilaiannya dengan baik dan hampir semua diungkapkan, walaupun hal ini sama juga terjadi pada BUS tetapi BUS total poin penilaian yang diungkapkannya lebih sedikit dibandingkan dengan UUS, ini yang menyebabkan UUS lebih unggul dibandingkan dengan BUS. Selain itu, terdapat beberapa kemungkinan juga yang menyebabkan belum baiknya kualitas aset atau pembiayaan dari BUS yaitu, pertama, sumber daya manusia dari BUS belum memiliki kapasitas dan kompetensi yang lebih baik dibandingkan dengan UUS yang mana masih disuport oleh bank konvensional dan yang kedua, pertumbuhan BUS dalam menyalurkan pembiayaan belum dimitigasi secara baik dengan prinsip kehati-hatian.

Pada dimensi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada BUS dan UUS, keduanya sama-sama sudah baik dan maksimal dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi komitmen terhadap debitur ini. Namun, UUS mendapatkan presentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan BUS. Hasil ini mendukung preposisi 6 pada penelitian ini yang mengatakan UUS dalam berkomitmen terhadap debitur lebih baik dibandingkan dengan BUS.

g) Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian di atas dapat diketahui P0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi komitmen terhadap masyarakat pada BUS dan UUS secara signifikan. Jika dilihat dari tabel 4.1 maka diketahui bahwa presentase yang didapatkan oleh BUS dan UUS memiliki perbedaan sebesar 12%, dan presentase yang didapatkan oleh BUS sebesar 54% sedangkan UUS 66%. Berdasarkan hasil presentase tersebut dapat diketahui bahwa UUS lebih baik dalam menerapkan identitas etika Islam dibandingkan dengan BUS. Walaupun jika dilihat lagi dari presentasinya keduanya sama-sama sudah baik dan maksimal dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi komitmen terhadap masyarakat. Keunggulan UUS dibandingkan BUS ini disebabkan karena pada pengungkapan poin penilaian sebagian besar bank-bank pada UUS mengungkapkannya dengan baik dalam laporan tahunannya.

Sedangkan pada BUS rata-rata bank pada BUS sudah banyak yang mengungkapkan juga tetapi nilai total yang diungkapkan oleh BUS tetap lebih sedikit dibandingkan dengan nilai total yang diungkapkan oleh UUS. Sehingga pada dimensi komitmen terhadap masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa dari uji beda yang dilakukan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pengungkapan BUS dan UUS pada dimensi komitmen terhadap karyawan ini. Dan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa UUS lebih unggul dibandingkan BUS dalam mengungkapkan dimensi ini, walaupun BUS dan UUS termasuk sudah baik dan cukup maksimal dalam mengungkapkan dimensi komitmen

terhadap masyarakat ini. Dari hasil ini dapat diketahui tidak mendukung preposisi 7 pada penelitian ini yang mengatakan BUS lebih menjalankan komitmen terhadap masyarakat dengan baik dibandingkan dengan UUS.

h) Dimesi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pada Dimesi Dewan Pengawas Syariah (DPS) P0 gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan Dimesi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BUS dan UUS secara signifikan. Berdasarkan tabel 4.1 diketahui perbedaan presentase antara BUS dan UUS ini hanya 2 %, selisih ini sangat kecil sehingga secara garis besar pada dimensi DPS ini termasuk yang tidak memiliki perbedaan antara BUS dan UUS. Sedangkan presentase yang didapatkan pada masing-masing BUS dan UUS adalah 43% dan 41%, BUS lebih tinggi 2% presentasinya dibandingkan dengan UUS. Hasil presentase pada BUS dan UUS ini termasuk sudah cukup baik dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi DPS walaupun belum begitu maksimal karena angka presentasinya di bawah 50%.

Dilihat dari poin penilaian yang didapatkan menunjukkan bahwa rata-rata bank-bank pada BUS dan UUS sudah sama-sama mengungkapkan identitas etika Islam dengan baik dan hampir semua sudah diungkapkan. Hanya saja BUS dan UUS sama-sama memiliki kekurangan dalam mengungkapkan poin penilaian mengenai laporan atas produk yang cacat dan distribusi keuntungan dan kerugian sesuai prinsip syariah pada BUS dan UUS sama-sama belum mengungkapkan poin penilaian ini. Dari hasil ini juga menunjukkan bahwa DPS pada BUS dan

UUS sama-sama sudah bekerja dengan baik dan mengungkapkan identitas etika Islam dengan cukup baik pada laporan tahunannya walaupun belum begitu maksimal. Hasil ini berbeda dengan preposisi 8 pada penelitian ini yang mengatakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS.

i) *Ethical Identity Index (EII)*

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan jadi dapat disimpulkan bahwa P0 gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan *Ethical Identity Index (EII)* pada BUS dan UUS secara signifikan. Hasil ini tidak mendukung dengan preposisi dalam penelitian ini yang mengatakan *Ethical Identity Index (EII)* pada Bank Umum Syariah lebih baik dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah. Jika dilihat pada Tabel 4.1 BUS dan UUS menunjukkan presentase 57% BUS dan UUS 53%, terdapat selisih 4%, tetapi selisih ini sangat kecil sehingga secara garis besar pada EII ini termasuk yang tidak menunjukkan perbedaan antara BUS dan UUS. Tetapi, jika dilihat dari presentase tersebut dapat diketahui bahwa BUS lebih unggul dalam menerapkan *Ethical Identity Index (EII)* dibandingkan dengan UUS. Dan dari presentase antara BUS dan UUS ini menunjukkan bahwa BUS dan UUS sudah sama-sama mengungkapkan *Ethical Identity Index (EII)* pada laporan tahunannya dengan baik dan sudah cukup maksimal. Hal ini juga sejalan dengan hasil yang didapatkan dari pengujian masing-masing dimensi yang mana rata-rata setiap dimensi pada BUS dan UUS sudah sama-sama mengungkapkan identitas etika Islam dengan baik pada setiap dimensinya. Ini membuktikan juga adanya upaya

yang dilakukan oleh BUS dan UUS dalam mengungkapkan informasi yang lebih mendetail mengenai identitas etika Islam pada BUS dan UUS sebagai bank yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah melalui laporan tahunan perusahaannya selama lima tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2014-2018.

Hasil pada penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Setiabudhi, Pramuka, Ramadhanti (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan *Islamic Ethical Identity Index* bank syariah di Indonesia adalah sebesar 70% yang mana hasil ini sudah menunjukkan hasil yang baik. Paramitasari (2012) juga menunjukkan hasil yang sama pada penelitiannya yang menyatakan bahwa praktik pengungkapan laporan tahunan ideal bank umum syariah untuk tahun 2007,2008,dan 2009 sudah baik. Dapat disimpulkan pada pengujian yang dilakukan pada *Ethical Identity Index* (EII) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS. Pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS pun sudah termasuk yang baik dan cukup maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa BUS dan UUS dalam mengungkapkan *Ethical Identity Index* (EII) pada laporan tahunannya selama lima tahun dari tahun 2014-2018 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan hasil ini tidak mendukung preposisi 9 pada penelitian ini. Pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) di dalam laporan tahunannya pada BUS dan UUS pun sudah termasuk yang baik dan cukup maksimal. Ini juga menunjukkan bahwa BUS dan UUS semakin sedikit variasi antara *communicated ethical identity* dengan *ideal ethical identity*. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan BUS dan UUS terhadap regulasi yang mengatur praktik pengungkapan laporan tahunan sudah baik. Jika dilihat lebih rinci lagi dapat diketahui pengungkapan setiap dimensi pada *Ethical Identity Index* (EII) yaitu sebagai berikut:

1. Pada dimensi pernyataan visi dan misi pada BUS dan UUS hasilnya mendukung preposisi 1. Dimana hasilnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada laporan tahunannya. Dan jika dilihat presentase yang didapatkan pada perhitungan EII BUS dan UUS sudah sama-sama mengungkapkan identitas etika Islam dengan cukup baik, namun dalam mengungkapkannya belum maksimal.
2. Hasil pengujian yang didapatkan pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak pada BUS dan UUS tidak terdapat perbedaan yang

signifikan dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada laporan tahunannya dan sudah menunjukkan hasil yang sama-sama baik dalam menerapkan identitas etika Islam dan termasuk yang sudah maksimal. Hasil pengujian pada dimensi ini menunjukkan tidak mendukung preposisi 2 pada penelitian ini.

3. Dapat disimpulkan dari hasil pengujian yang sudah dilakukan bahwa preposisi 3 pada penelitian ini tidak didukung. Hasilnya pada dimensi produk dan layanan menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BUS dan UUS dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada laporan tahunannya. Dan pada dimensi ini dapat dikategorikan sudah sama-sama cukup baik dalam mengungkapkan identitas etika Islam dalam laporan tahunannya.
4. Pada dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan ini terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengungkapkan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan ini, dan BUS jauh lebih baik dibandingkan UUS, hal ini dikarenakan hasil perhitungan EII pada BUS dan UUS menunjukkan bahwa UUS sangat belum maksimal dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan yang mana mengartikan juga bahwa dalam laporan tahunan pada UUS belum mencerminkan identitas etika Islam dengan baik. Sedangkan BUS dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi ini sudah termasuk yang cukup baik dan maksimal. Hasil pengujian pada dimensi ini mendukung preposisi 4 pada penelitian ini.

5. Dari pengujian yang sudah dilakukan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengungkapan identitas etika Islam pada dimensi komitmen terhadap karyawan pada BUS dan UUS. BUS dan UUS dalam mengungkapkan dimensi ini termasuk sudah baik dan maksimal, tetapi UUS lebih baik dalam mengungkapkan identitas etika Islam dibandingkan dengan BUS. Hasil pada pengujian ini mendukung preposisi 5 pada penelitian ini.
6. Pada dimensi komitmen terhadap debitur ini didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada laporan tahunan BUS dan UUS. Preposisi 6 pada penelitian ini didukung. Hasilnya BUS dan UUS sama-sama sudah baik dan maksimal dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi komitmen terhadap debitur ini. Namun, berdasarkan perhitungan EII pada tiap dimensi UUS mendapatkan presentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan BUS.
7. Pengujian yang sudah dilakukan menunjukkan pada dimensi komitmen terhadap masyarakat terdapat perbedaan yang signifikan pada pengungkapan BUS dan UUS dalam laporan tahunannya. Dan pengujian EII pada tiap dimensi ini dapat diketahui bahwa UUS lebih unggul dibandingkan BUS dalam mengungkapkan dimensi ini, walaupun BUS dan UUS termasuk sudah baik dan cukup maksimal dalam mengungkapkan dimensi komitmen terhadap masyarakat. Hasil pada penelitian ini menunjukkan tidak mendukung preposisi 7.
8. Pada Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan hasil bahwa DPS pada BUS dan UUS sama-sama sudah bekerja dengan baik dan

mengungkapkan identitas etika Islam dengan cukup baik pada laporan tahunannya walaupun belum begitu maksimal. Dan pengungkapan identitas etika Islam pada BUS dan UUS tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hasil pada pengujian dimensi ini tidak mendukung preposisi 8.

5.2 SARAN

1. Penelitian ini hanya meneliti BUS dan UUS saja belum meneliti BPRS yang mana ini juga termasuk dalam Bank Syariah. Saran untuk penelitian kedepan bisa mengambil sampel dari BPRS juga agar hasilnya bisa lebih menggambarkan keadaan bank syariah yang sebenarnya
2. Penelitian ini hanya membahas perbandingan penerapan EII dalam BUS dan UUS, penulis belum memasukkan variabel-variabel lainnya. Saran untuk penelitian kedepan bisa memasukkan variabel-variabel yang dapat memperluas aspek pembahasan. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa menggunakan pendekatan lain dalam mengukur identitas etis Islam. Misalnya penelitian selanjutnya dapat langsung mengukur dan menilai penerapan identitas etika Islam dengan melakukan mengamati operasi perusahaan secara langsung atau melakukan wawancara dengan manajemen mengenai bagaimana penerapan dan langkah selanjutnya berkaitan dengan penerapan identitas etika Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Academia.edu."Analitik Parametrik Uji Beda : Independent Simple T-Test".
Diakses 9 Januari.<https://www.academia.edu/34254849/> ANALITIK_ PARAMETRIK_Uji_Beda_Independent_Simple_T-Test.
- Abubakar, L., dan Handayani, T. 2018. "Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah." *Law and Justice* 2(2): 124–134.
- Afif, Z., dan Mawardi, I. 2014. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013." *JESTT* 1(8):565–580.
- Afifatus, A. 2012. "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya*.
- Apriliani, A, M., Dewi Y R, R., dan Cakhyaneu, A. 2019. "Prevention of Fraud in Sharia Banking in Indonesia through Implementation of Sharia Corporate Governance." *KnE Social Sciences* 3(13):183–202.
- Ascarya, dan Yumanita, D. 2010. *Bank Syariah: Gambaran Umum PUSAT*. In Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) (Vol. 14, Issue 14). http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-publik/kebanksentralan/Documents/14_Bank_Syariah_Gambaran_Umum.pdf.
- Baedowi, A. 2011. "Etika Bisnis Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 9(2):239–250.
- Bulutoding, L.,; dan Akbar, M. R. 2018. "Perbandingan Kinerja dan Pengungkapan Etika Islam pada PT Bank Muamalat dengan PT Bank BNI Syariah." *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2(1):27–41.
- Chapra, M. 2008. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Sharia'ah* (15). United Kingdom.Cromwell Press.
- Ernawati. 2019. "Studi Penyimpangan Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2(1):32–46.
- Farooq, M. O. 2007. "Partnership , Equity-Financing and Islamic Finance : Whither Profit-Loss Sharing?" *International Association for Eslamic Economics* 11(Special Issue):67–88.
- Hamzah, Y., dan Hafied, H. 2014. *Etika Bisnis Islam* (E. 1 (ed.)). Kretakupa Print.
- Haniffa, R. dan Hudaib, M. 2007. "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports." *Journal of Business Ethics* 76(1):97–116.

- Hanim Tafri, F., Abdul Rahman, R., dan Omar, N. 2011. "Empirical Evidence on The Risk Management Tools Practised in Islamic and Conventional Banks." *Qualitative Research in Financial Markets* 3(2): 86–104.
- Hariwibowo, R. 2018. "Analisis Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman." *Jurnal FEB Unmul* 15(2):76–81.
- Juliyani, E. 2016. "Etika Bisnis dalam Persepektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* VII(1):63–74.
- Kasim, S. R., dan Bukido, R. 2018. "Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Potret Pemikiran* 22(2):1–14.
- Kustanti, H., dan Indriani, A. 2016. "Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) Periode 2010-2014." Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Lesduwiyana, L., dan Widyawati, D. 2018. "Penerapan Balanced Scorecard sebagai Pencapaian Visi dan Misi pada Rumah Sakit." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7: 1–17.
- Mardatillah, A. 2013. "Etika Bisnis dalam Prespektif Islam." *JIS* 6(1): 89–98.
- Mas'ud, M. 2011. "Analisis Pengungkapan Nilai Islam dalam Laporan Tahunan Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal SEBI* 1 (2007):5–28.
- Mulazid, A. S. 2016. "Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)." *MADANIA* 20(95): 37–54.
- Muslich. 2004. *Etika Bisnis Islami* (Edisi Pert). Ekonisia.
- Nawatmi, S. 2010. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Fokus Ekonomi* 9(1): 50–59.
- Nugroho, L., Kuncoro, F. W., dan Mastur, A. A. 2019. "Analisis Perbandingan Bank Umum Syariah Dengan Unit Usaha Syariah Dari Aspek Efisiensi; Kualitas Asset Dan Stabilitas Keuangan (Periode Tahun 2014-2017)." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6(2): 100–118.
- Nuraini, A. 2014. "Pengaruh Citra, Pelayanan, Aksesoris Jasa, Keragaman Produk Dan Nilai Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Pada Nasabah BPD DIY Syariah Yogyakarta)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* IX(1): 67–82.
- Panggabean, E., dan Tandiontong, M. 2017. "Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Binsis* 17(1): 66–76.

- Paramitasari, R. 2012. "Islamic Corporate Identity In The Practice of Annual Report Disclosure Islamic Bank." *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 1:34–44.
- Putra, R. A. ,dan Farahmita, A. 2013. "Analisis Ethical Identity Index Sebagai Pengukuran Tingkat Pengungkapan Etika Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Periode 2010-2011." Universitas Indonesia.
- Putra, R., dan Wijayanti, R. R. 2020. "Islamic Values in the Annual Reports of the Shariah Bank to Create a Sharia Value-Added." *Journal of Accounting and Investment* 21(1):91–113.
- Putritama, A. 2018. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7(1): 1–20.
- Quttainah, M. A., dan Almutairi, A. R. 2017. "Corporate ethics: evidence from Islamic banks." *Journal of Management and Governance* 21(4):815–840.
- Ritawati, R. A. 2015. "Peran Kompensasi terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan pada Perbankan Syariah Palembang." *I-Finance* 1(1): 63–79.
- Riyanto, Slamet dan Andhita, A. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Edisi 1). Deepublish.
<https://books.google.co.id/books?id=W2vXDwAAQBAJ&pg=PA93&dq=metodologi+penelitian+kuantitatif+uji+beda&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwimu4Tc4LDoAhX0juYKHTuqCk0Q6AEIODAC#v=onepage&q=metodologi+penelitian+kuantitatif+uji+beda&f=false>.
- Sardar, Z., dan Nafik, M. 2016. "Kesejahteraan dalam Prespektif Islam pada Karyawan Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3:391–401.
- Setiabudhi, H., Agus, B., dan Ramadhanti, W. 2020. "Analisis Perbandingan Pengungkapan Islamic Ethical Identity Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)* 22:69–77.
- Sidani, Y., dan Al Ariss, A. 2015. "New Conceptual Foundations for Islamic Business Ethics: The Contributions of Abu-Hamid Al-Ghazali." *Journal of Business Ethics* 129(4):847–857.
- Siddiqui, A. 2008. "Financial Contracts, Risk and Performance of Islamic Banking." *Managerial Finance* 34(10):680–694.
- Srairi, S. 2019. "Transparency and Bank Risk-taking in GCC Islamic Banking." *Borsa Istanbul Review* 19:S64–S74.
- Sudarsono, H. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi 2). Ekonisia.
- Sukardi, Budi dan Wijaya, T. 2013. "Corporate Ethical Identity Perbankan

- Syariah di Indonesia." *Jurnal Tsaqafah* 9(2):339–356.
- Supriyaningsih, O. 2020. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indexes." *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1(1): 47–60.
- Syukron, A. 2015. "CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5(1): 1–22.
- Triyuwono, I. 2011. "Mengangkat “Sing Liyan” Untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2 Vol 2:186–368.
- Wikaningrum, T. 2011. "Praktek dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Perbankan Syariah." *Jurnal Siasat Bisnis* 15(1): 99–122.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Daftar Sampel Bank pada BUS dan UUS

No	Nama Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Bank Umum Syariah	
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	Bank BRISyariah
4	B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah
5	Bank BNI Syariah
6	Bank Syariah Mandiri
7	Bank Syariah Mega Indonesia
8	Bank Panin Syariah
9	PT. Bank Syariah Bukopin
10	PT. BCA Syariah
11	PT. Maybank Syariah Indonesia
12	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
Unit Usaha Syariah	
1	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
2	PT Bank Permata Tbk
3	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
4	PT Bank OCBC Nisp, Tbk
5	PT BPD DKI
6	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
7	PT BPD Jawa Tengah
8	PT Bpd Sumatera Utara
9	BPD Sumatera Barat
10	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
11	PT BPD Kalimantan Selatan
12	PT BPD Kalimantan Barat
13	PT BPD Kalimantan Timur
14	PT BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat
15	PT Bank Sinarmas
16	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

LAMPIRAN 2
Hasil Perhitungan EII pada BUS

No	Nama Bank Umum Syariah	Tahun	Dimensi								Total EII Tiap Tahun	Total EII Rata-rata 5 tahun
			A	B	C	D	E	F	G	H		
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	2014	67%	85%	60%	73%	78%	75%	71%	45%	69%	70%
		2015	56%	85%	60%	73%	78%	100%	71%	45%	69%	
		2016	56%	85%	70%	73%	89%	100%	71%	45%	72%	
		2017	44%	85%	60%	73%	100%	75%	71%	55%	71%	
		2018	67%	85%	60%	73%	67%	75%	71%	55%	69%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			58%	85%	62%	73%	82%	85%	71%	49%		
2	PT. Bank Victoria Syariah	2014	22%	69%	30%	60%	22%	50%	0%	45%	41%	45%
		2015	33%	62%	30%	60%	22%	50%	0%	45%	41%	
		2016	33%	69%	30%	60%	56%	75%	0%	45%	47%	
		2017	33%	69%	30%	60%	44%	75%	0%	55%	47%	
		2018	33%	69%	30%	60%	44%	75%	0%	55%	47%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			31%	68%	30%	60%	38%	65%	0%	49%		
3	Bank BRI Syariah	2014	44%	85%	50%	73%	11%	75%	71%	36%	56%	65%
		2015	44%	85%	50%	73%	44%	75%	71%	36%	60%	
		2016	44%	92%	70%	73%	56%	100%	86%	64%	72%	
		2017	44%	92%	70%	73%	100%	75%	71%	36%	71%	

		2018	44%	92%	40%	73%	100%	75%	71%	27%	65%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			44%	89%	56%	73%	62%	80%	74%	40%		
4	B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah	2014	0%	69%	40%	60%	22%	75%	29%	18%	40%	54%
		2015	0%	69%	50%	60%	22%	75%	29%	18%	41%	
		2016	44%	85%	40%	60%	67%	75%	57%	36%	58%	
		2017	44%	85%	40%	60%	100%	75%	57%	27%	60%	
		2018	44%	85%	70%	60%	100%	75%	57%	70%	69%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			27%	78%	48%	60%	62%	75%	46%	34%		
5	Bank BNI Syariah	2014	44%	85%	70%	67%	11%	75%	71%	55%	60%	68%
		2015	44%	92%	70%	67%	89%	75%	71%	64%	72%	
		2016	67%	92%	70%	67%	100%	75%	71%	64%	76%	
		2017	44%	85%	60%	67%	78%	75%	71%	55%	67%	
		2018	44%	85%	60%	67%	56%	75%	86%	55%	65%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			49%	88%	66%	67%	67%	75%	74%	58%		
6	Bank Syariah Mandiri	2014	44%	85%	80%	53%	100%	75%	71%	55%	69%	73%
		2015	78%	85%	60%	73%	100%	75%	71%	55%	74%	
		2016	78%	92%	70%	67%	100%	75%	71%	64%	77%	
		2017	78%	85%	60%	67%	78%	75%	71%	55%	71%	
		2018	78%	92%	70%	67%	89%	75%	71%	45%	73%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			71%	88%	68%	65%	93%	75%	71%	55%		
7	Bank Syariah Mega Indonesia	2014	33%	69%	10%	67%	67%	0%	43%	27%	45%	53%
		2015	33%	77%	10%	67%	44%	0%	57%	36%	46%	

		2016	33%	85%	50%	67%	67%	50%	57%	36%	58%	
		2017	33%	85%	50%	67%	78%	50%	57%	36%	59%	
		2018	33%	77%	60%	67%	78%	50%	57%	27%	58%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			33%	78%	36%	67%	67%	30%	54%	33%		
8	Bank Panin Syariah	2014	33%	85%	40%	67%	78%	50%	57%	45%	59%	57%
		2015	44%	85%	40%	67%	44%	50%	57%	55%	58%	
		2016	44%	85%	40%	67%	67%	50%	57%	55%	60%	
		2017	44%	92%	40%	67%	44%	75%	57%	45%	59%	
		2018	44%	92%	30%	27%	56%	75%	57%	27%	49%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			42%	88%	38%	59%	58%	60%	57%	45%		
9	PT. Bank Syariah Bukopin	2014	22%	92%	40%	27%	56%	50%	57%	36%	47%	47%
		2015	22%	92%	40%	27%	44%	50%	57%	36%	46%	
		2016	22%	92%	60%	27%	44%	50%	57%	36%	49%	
		2017	22%	92%	40%	27%	67%	50%	57%	36%	49%	
		2018	22%	92%	40%	27%	56%	50%	57%	30%	46%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			22%	92%	44%	27%	53%	50%	57%	35%		
10	PT. BCA Syariah	2014	22%	92%	20%	67%	22%	25%	57%	18%	45%	50%
		2015	22%	92%	20%	67%	22%	25%	43%	18%	44%	
		2016	22%	77%	20%	67%	44%	25%	43%	27%	45%	
		2017	67%	85%	20%	67%	56%	25%	43%	36%	54%	
		2018	67%	92%	30%	67%	78%	50%	86%	27%	63%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			40%	88%	22%	67%	44%	30%	54%	25%		

11	PT. Maybank Syariah Indonesia	2014	33%	85%	50%	13%	0%	50%	57%	36%	40%	44%
		2015	33%	85%	50%	13%	33%	50%	43%	45%	44%	
		2016	33%	85%	40%	13%	56%	50%	71%	45%	47%	
		2017	33%	85%	40%	13%	56%	50%	29%	45%	44%	
		2018	33%	85%	40%	13%	56%	50%	29%	45%	44%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			33%	85%	44%	13%	40%	50%	46%	44%		
12	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2014	56%	92%	50%	20%	44%	75%	86%	36%	54%	54%
		2015	56%	92%	50%	20%	56%	75%	86%	36%	55%	
		2016	56%	92%	30%	20%	44%	75%	86%	36%	51%	
		2017	56%	92%	40%	20%	56%	75%	86%	36%	54%	
		2018	56%	92%	40%	20%	56%	75%	86%	36%	54%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			56%	92%	42%	20%	51%	75%	86%	36%		
Total Rata-Rata EII untuk Tiap Dimensi		2014	35%	83%	45%	54%	43%	56%	56%	38%	51%	TOTAL EII BUS
		2015	39%	83%	44%	56%	50%	58%	55%	41%	53%	57%
		2016	44%	86%	49%	55%	66%	67%	61%	46%	59%	
		2017	45%	86%	46%	55%	71%	65%	56%	43%	58%	
		2018	47%	87%	48%	52%	69%	67%	61%	42%	59%	
Total EII selama 5 tahun untuk tiap Dimensi			42%	85%	46%	54%	60%	63%	58%	42%		

LAMPIRAN 3
Hasil Perhitungan EII pada UUS

No	Nama Bank Umum Syariah	Tahun	Dimensi								Total EII Tiap Tahun	Total EII Rata-rata 5 tahun
			A	B	C	D	E	F	G	H		
1	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2014	33%	85%	70%	60%	56%	75%	86%	55%	64%	62%
		2015	33%	85%	70%	60%	44%	75%	86%	45%	62%	
		2016	33%	92%	50%	60%	67%	75%	71%	55%	63%	
		2017	33%	92%	50%	60%	56%	75%	71%	55%	62%	
		2018	33%	92%	50%	60%	56%	75%	71%	55%	62%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			33%	89%	58%	60%	56%	75%	77%	53%		
2	PT Bank Permata Tbk	2014	33%	92%	50%	60%	44%	75%	71%	36%	58%	52%
		2015	44%	92%	40%	13%	44%	75%	71%	36%	49%	
		2016	44%	92%	50%	13%	22%	75%	71%	36%	47%	
		2017	44%	92%	50%	13%	56%	75%	71%	36%	51%	
		2018	44%	92%	50%	13%	78%	75%	71%	36%	54%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			42%	92%	48%	23%	49%	75%	71%	36%		
3	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	2014	44%	92%	50%	0%	56%	75%	71%	36%	49%	55%
		2015	44%	92%	50%	7%	100%	75%	71%	45%	56%	
		2016	44%	92%	50%	7%	100%	75%	71%	45%	56%	

		2017	44%	92%	50%	7%	100%	75%	71%	45%	56%	
		2018	44%	92%	50%	7%	100%	75%	71%	45%	56%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			44%	92%	50%	5%	91%	75%	71%	44%		
4	PT Bank OCBC Nisp, Tbk	2014	44%	92%	60%	7%	100%	75%	86%	36%	58%	54%
		2015	44%	92%	60%	0%	100%	75%	71%	36%	55%	
		2016	44%	92%	60%	0%	67%	75%	71%	36%	51%	
		2017	44%	92%	60%	0%	78%	75%	71%	36%	53%	
		2018	44%	92%	70%	7%	56%	75%	71%	36%	53%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			44%	92%	62%	3%	80%	75%	74%	36%		
5	PT BPD DKI	2014	44%	85%	60%	33%	78%	75%	71%	36%	58%	56%
		2015	44%	92%	30%	0%	78%	75%	71%	18%	46%	
		2016	44%	92%	60%	33%	78%	75%	71%	45%	60%	
		2017	44%	92%	90%	33%	78%	75%	71%	64%	67%	
		2018	44%	92%	40%	0%	78%	75%	71%	18%	47%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			44%	91%	56%	20%	78%	75%	71%	36%		
6	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	2014	33%	77%	60%	33%	44%	75%	57%	36%	50%	56%
		2015	33%	85%	50%	60%	67%	75%	71%	36%	59%	
		2016	33%	85%	40%	60%	67%	75%	71%	36%	58%	
		2017	33%	85%	50%	60%	44%	75%	71%	36%	56%	
		2018	33%	85%	40%	60%	56%	75%	86%	36%	58%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			33%	83%	48%	55%	56%	75%	71%	36%		
7	PT BPD Jawa Tengah	2014	44%	85%	80%	20%	89%	75%	71%	73%	64%	62%
		2015	44%	85%	70%	20%	100%	75%	71%	73%	64%	

		2016	44%	85%	80%	20%	89%	75%	71%	45%	60%	
		2017	44%	85%	80%	20%	33%	75%	71%	64%	56%	
		2018	44%	85%	80%	20%	100%	75%	71%	64%	64%	
		Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank		44%	85%	78%	20%	82%	75%	71%	64%	
8	PT Bpd Sumatera Utara	2014	22%	92%	40%	40%	100%	75%	71%	36%	58%	49%
		2015	22%	92%	40%	0%	100%	75%	86%	36%	51%	
		2016	22%	85%	40%	0%	56%	75%	71%	36%	44%	
		2017	22%	85%	40%	0%	56%	75%	71%	36%	44%	
		2018	22%	92%	30%	0%	89%	75%	71%	36%	47%	
		Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank		22%	89%	38%	8%	80%	75%	74%	36%	
9	BPD Sumatera Barat	2014	44%	92%	60%	0%	78%	75%	57%	36%	51%	51%
		2015	44%	92%	40%	0%	67%	75%	57%	36%	47%	
		2016	44%	85%	50%	0%	67%	75%	71%	36%	49%	
		2017	44%	92%	50%	0%	100%	75%	57%	36%	53%	
		2018	44%	92%	50%	0%	100%	75%	57%	36%	53%	
		Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank		44%	91%	50%	0%	82%	75%	60%	36%	
10	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2014	22%	85%	60%	53%	89%	75%	57%	36%	59%	56%
		2015	22%	85%	50%	67%	89%	75%	57%	36%	60%	
		2016	22%	92%	50%	0%	100%	75%	57%	64%	54%	
		2017	44%	92%	30%	0%	100%	75%	57%	36%	50%	
		2018	44%	92%	50%	0%	100%	75%	57%	55%	55%	
		Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank		31%	89%	48%	24%	96%	75%	57%	45%	
11	PT BPD Kalimantan Selatan	2014	22%	77%	30%	60%	67%	75%	57%	27%	51%	47%

		2015	22%	77%	30%	0%	67%	75%	57%	36%	41%	
		2016	22%	85%	40%	0%	67%	75%	57%	36%	44%	
		2017	22%	85%	30%	0%	78%	75%	57%	18%	41%	
		2018	22%	85%	70%	60%	67%	75%	57%	45%	60%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			22%	82%	40%	24%	69%	75%	57%	33%		
12	PT BPD Kalimantan Barat	2014	22%	85%	40%	0%	67%	75%	57%	36%	44%	44%
		2015	22%	85%	40%	0%	56%	50%	57%	36%	41%	
		2016	22%	92%	30%	0%	78%	50%	57%	64%	47%	
		2017	22%	77%	60%	0%	67%	50%	57%	55%	46%	
		2018	22%	77%	50%	0%	56%	50%	57%	55%	44%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			22%	83%	44%	0%	64%	55%	57%	49%		
13	PT BPD Kalimantan Timur	2014	33%	69%	40%	0%	67%	75%	43%	36%	41%	41%
		2015	33%	77%	40%	0%	44%	75%	57%	18%	38%	
		2016	33%	92%	30%	0%	44%	75%	57%	18%	40%	
		2017	22%	92%	40%	0%	78%	75%	71%	18%	45%	
		2018	22%	92%	30%	0%	67%	75%	71%	18%	42%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			29%	85%	36%	0%	60%	75%	60%	22%		
14	PT BPD Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat	2014	33%	85%	50%	0%	100%	75%	57%	18%	47%	49%
		2015	33%	85%	50%	0%	100%	75%	57%	36%	50%	
		2016	33%	85%	50%	0%	100%	75%	57%	36%	50%	
		2017	33%	85%	60%	0%	100%	75%	71%	27%	51%	
		2018	33%	85%	40%	0%	78%	75%	57%	36%	46%	
Rata-rata untuk setiap Dimensi per Bank			33%	85%	50%	0%	96%	75%	60%	31%		

15	PT Bank Sinarmas	2014	44%	85%	60%	0%	67%	75%	57%	45%	50%	54%
		2015	44%	85%	50%	0%	89%	75%	57%	45%	51%	
		2016	44%	85%	30%	0%	78%	75%	71%	45%	49%	
		2017	44%	92%	50%	47%	78%	75%	71%	36%	60%	
		2018	44%	92%	60%	27%	78%	75%	71%	45%	59%	
			44%	88%	50%	15%	78%	75%	66%	44%		
16	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	2014	33%	85%	60%	20%	78%	75%	57%	36%	53%	57%
		2015	33%	92%	70%	20%	78%	75%	71%	27%	55%	
		2016	33%	92%	70%	7%	78%	75%	57%	36%	53%	
		2017	44%	92%	60%	27%	100%	75%	57%	73%	64%	
		2018	56%	85%	70%	13%	100%	75%	57%	64%	62%	
			40%	89%	66%	17%	87%	75%	60%	47%		
Total Rata-Rata EII untuk Tiap Dimensi		2014	35%	85%	54%	24%	74%	75%	64%	39%	56%	TOTAL EII UUS
		2015	35%	87%	49%	15%	76%	73%	67%	38%	55%	56%
		2016	35%	89%	49%	13%	72%	73%	66%	42%	55%	
		2017	37%	89%	53%	17%	75%	73%	67%	42%	57%	
		2018	38%	89%	52%	17%	78%	73%	67%	43%	57%	
Total EII selama 5 tahun untuk tiap Dimensi			36%	88%	51%	17%	75%	74%	66%	41%		

LAMPIRAN 4

Hasil Uji Normalitas Dimensi Pernyataan Visi dan Misi

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi Visi Misi BUS	,156	12	,200*

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi Visi Misi UUS	,207	16	,066

LAMPIRAN 5

Hasil Uji Normalitas Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak BUS	,230	12	,079

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.

Dimensi Dewan Komisaris Dan Manajemen Puncak UUS	,196	16	,102
--	------	----	------

LAMPIRAN 6

Hasil Uji Normalitas Dimensi Produk dan Layanan

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi Produk Dan Layanan BUS	,179	12	,200*

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi Produk dan Layanan UUS	,238	16	,016

LAMPIRAN 7

Hasil Uji Normalitas Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi Zakat Sedekah dan Pinjaman Kebajikan BUS	,349	12	,000

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi Zakat Sedekah dan Pinjaman Kebajikan UUS	,229	16	,025

LAMPIRAN 8

Hasil Uji Normalitas Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan BUS	,159	12	,200*

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan UUS	,199	16	,089

LAMPIRAN 9

Hasil Uji Normalitas Dimensi Komitmen Terhadap Debitur

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi Komitmen Terhadap Debitur BUS	,259	12	,026

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi Komitmen Terhadap Debitur UUS	,536	16	,000

LAMPIRAN 10

Hasil Uji Normalitas Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat BUS	,187	12	,200*

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.

Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat UUS	,256	16	,006
--	------	----	------

LAMPIRAN 11

Hasil Uji Normalitas Dimensi Dimesi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi DPS BUS	,164	12	,200*

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Dimensi DPS UUS	,237	16	,016

LAMPIRAN 12

Hasil Uji Normalitas *Ethical Identity Index* (EII)

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
EII BUS	,188	12	,200*

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
EII UUS	,143	16	,200*

LAMPIRAN 13

Hasil Uji Homogenitas Dimensi Pernyataan Visi dan Misi

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	
	F	Sig.
Dimensi Visi dan Misi	2,444	,130
Equal variances assumed		
Equal variances not assumed		

LAMPIRAN 14

Hasil Uji Homogenitas Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances	
		F	Sig.
DimensiDe wanKomisa risDanMana jemanPunca k	Equal variances assumed	7,181	,013
	Equal variances not assumed		

LAMPIRAN 15

Hasil Uji Homogenitas Dimensi Produk dan Layanan

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances	
		F	Sig.
Dimensi Produk dan Layanan	Equal variances assumed	,709	,407
	Equal variances not assumed		

LAMPIRAN 16

Hasil Uji Homogenitas Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman

Kebajikan

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances	
		F	Sig.
Dimensi Zakat Sedekah	Equal variances assumed	,643	,430

Dan	Equal		
Pinjaman	variances		
Kebajikan	not assumed		

LAMPIRAN 17

Hasil Uji Homogenitas Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances	
		F	Sig.
Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan	Equal variances assumed	,000	,985
	Equal variances not assumed		

LAMPIRAN 18

Hasil Uji Homogenitas Dimensi Komitmen Terhadap Debitur

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances	
		F	Sig.
Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	Equal variances assumed	22,469	,000
	Equal variances not assumed		

LAMPIRAN 19

Hasil Uji Homogenitas Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances	
		F	Sig.
Dimensi Komitmen Terhadap	Equal variances assumed	4,694	,040

Masyarakat	Equal variances not assumed		
------------	-----------------------------------	--	--

LAMPIRAN 20

Hasil Uji Homogenitas Dimensi Dimesi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances	
		F	Sig.
Dimensi DPS	Equal variances assumed	,078	,782
	Equal variances not assumed		

LAMPIRAN 21

Hasil Uji Homogenitas pada *Ethical Indentity Index* (EII)

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	
	F	Sig.
EI Equal variances assumed	5,348	,029
Equal variances not assumed		

LAMPIRAN 22

Hasil Uji Beda Independent T-Test Dimensi Pernyataan Visi dan Misi

		t-test for Equality of Means						
		t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Differe nce	Std. Error Differe nce	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
Dimensi Visi Misi	Equal variances assumed	1,488	26	,149	,06479	,04355	-,02472	,15431
	Equal variances not assumed	1,388	16,916	,183	,06479	,04667	-,03372	,16330

LAMPIRAN 23

Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak

	Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak
Mann-Whitney U	64,000
Wilcoxon W	142,000
Z	-1,501
Asymp. Sig. (2-tailed)	,133
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,146 ^b

LAMPIRAN 24

Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada Dimensi Produk dan Layanan

	Dimensi Produk Dan Layanan
Mann-Whitney U	64,500
Wilcoxon W	142,500
Z	-1,468
Asymp. Sig. (2-tailed)	,142
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,146 ^b

LAMPIRAN 25

Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan

	Dimensi Zakat Sedekah dan Pinjaman Kebajikan
Mann-Whitney U	19,000
Wilcoxon W	155,000
Z	-3,589
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,000 ^b

LAMPIRAN 26

Hasil Uji Beda Independent T-Test Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan

		t-test for Equality of Means						
		t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
DimensiKomitmenTerhadapKaryawan	Equal variances assumed	-2,662	26	,013	-,15667	,05885	-,27763	-,03571
	Equal variances not assumed	-2,619	22,306	,016	-,15667	,05981	-,28060	-,03273

LAMPIRAN 27

Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada Dimensi Komitmen Terhadap Debitur

	Dimensi Komitmen Terhadap Debitur
Mann-Whitney U	60,500
Wilcoxon W	138,500
Z	-2,067
Asymp. Sig. (2-tailed)	,039
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,100 ^b

LAMPIRAN 28**Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat**

	Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat
Mann-Whitney U	54,000
Wilcoxon W	132,000
Z	-1,975
Asymp. Sig. (2-tailed)	,048
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,053 ^b

LAMPIRAN 29**Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

	Dimensi DPS
Mann-Whitney U	84,500
Wilcoxon W	220,500
Z	-,539
Asymp. Sig. (2-tailed)	,590
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,599 ^b

LAMPIRAN 30**Hasil Uji Beda Uji Mann Whitney pada *Ethical Identity Index* (EII)**

	EII
Mann-Whitney U	80,500
Wilcoxon W	216,500
Z	-,721
Asymp. Sig. (2-tailed)	,471
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,478 ^b